

BAB IV

PERAN UNITED NATIONS WOMEN FOR ENTITY GENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) DALAM MENGATASI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAKISTAN

4.1 UN Women Sebagai Organisasi Internasional

4.1.1 Profil UN WOMEN

UN Women didirikan oleh Majelis Umum PBB, pada 2 Juli 2010 dan telah aktif pada Januari 2011. UN Women ialah Sebuah organisasi internasional yang mempunyai fokus terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Majelis Umum PBB mendukung pembentukan UN Women. Dengan ini, negara yang menjadi Anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuka jalan bersejarah dalam mempercepat tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di organisasi. Diciptakannya UN Women sebagai divisi dari rancangan pembaruan PBB, untuk menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar.¹

Pembentukan UN Women merupakan salah satu cara untuk melibatkan negara-negara anggota dan mengambil langkah maju yang besar bagi perkembangan perempuan di seluruh dunia. UN Women mengumpulkan sumber daya dan mandat untuk menciptakan perubahan dan dampak yang lebih besar untuk memajukan

¹ UN Women, "About UN Women". Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> pada tgl 3 Mei 2022.

kesetaraan gender, memperluas peluang dan secara signifikan memperkuat upaya PBB untuk mengakhiri diskriminasi di seluruh dunia.²

UN Women berdiri dari empat bagian yang berbeda dari sistem PBB yang sebelumnya yang berfokus pada gender equality dan pemberdayaan perempuan, yaitu:³

1. Divisi untuk pemajuan perempuan atau *Division for the Advancement of Women* (DAW).
2. Institut penelitian dan pelatihan internasional untuk kemajuan perempuan atau *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW).
3. Kantor penasihat khusus isu gender dan kemajuan perempuan atau *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* (OSAGI).
4. Dana pembangunan PBB untuk perempuan atau *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM).

Pembentukan UN Women adalah hasil tanggapan Sekjen PBB atas Resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Selanjutnya, di tahun 2006 pada bulan januari, Sekjen Ban Ki-moon menyerahkan laporan A/64 /588, terkait “Proposal Komprehensif untuk Unit Gabungan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”, dalam mengusulkan agar unit baru pada UN Women agar melanjutkan sistem tersebut. Dan

² Ibid

³ Ibid

juga untuk Mendukung badan-badan PBB lainnya yang ditugaskan untuk berkontribusi pada promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan organisasi UN Women yang baru berusaha untuk mempertajam fokus dan dampak dari kegiatan-kegiatan ini di seluruh sistem PBB.⁴

Ketentuan resolusi 63/311 tentang sistem koherensi keseluruhan, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2 Oktober 2010, adalah cetak biru untuk UN Women. Resolusi 63/311 tentang mengatur penguatan kelembagaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa bertanggung jawab atas empat bagian berbeda dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Fokus pada badan gabungan yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal. Selain itu, resolusi tersebut meminta Sekjen PBB untuk mengajukan proposal yang menetapkan pernyataan misi kompleks dan aturan organisasi, termasuk struktur organisasi, sumber biaya, dan komite eksekutif untuk mengawasi kegiatannya.⁵

Selanjutnya, di tanggal 14 September tahun 2010, ditetapkan Michelle Bachelet yang merupakan mantan Presiden Chile, diangkat sebagai Direktur Eksekutif pertama UN Women. Dalam pembentukannya UN Women didukung oleh berbagai negara dan menyambut Bachelet sebagai ketuanya. Pada Debat Umum Sidang ke-65 Majelis

⁴ United Nations, "Resolution adopted by the General Assembly on 14 September 2009". Diakses melalui: <https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/513/62/PDF/N0951362.pdf?OpenElement> pada 5 Mei 2022.

⁵ Ibid

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pemimpin dunia memberikan reaksi positif, memuji kreasi organisasi dalam niatnya untuk memberdayakan perempuan, serta mengakui status Bachelet sebagai ketua perempuan UN Women pertama.⁶

Pada tahun pertama, sekitar \$500 juta diberikan kepada UN Women. Sekjen Ban Ki-moon memperkirakan bahwa sekitar \$125 juta per tahun diperlukan untuk biaya operasional dan penyediaan kapasitas di tingkat nasional, regional dan kantor pusat. Selain itu, tambahan \$375 juta per tahun akan diperlukan pada tahap awal untuk memenuhi permintaan bantuan program tingkat negara bagian. Pendanaa tersebut merupakan sarana untuk mendukung pengembangan kebijakan oleh CSW dan badan antar pemerintah lainnya, membantu Negara-negara Anggota dalam menerapkan standar terkait perempuan, dan secara teratur memantau kemajuan di seluruh sistem.

Wewenang tugas dan fungsi UN Women merupakan gabungan tugas dan fungsi Kantor Penasihat Khusus untuk Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender, Divisi Pemberdayaan Perempuan, pembiayaan Pembangunan PBB bagi Perempuan, dan Lembaga Penelitian dan Training Internasional yang di tujukan bagi pertumbuhan perempuan. Kemudian Unit tersebut harus menjadi yang utama dalam mengatur dan memajukan akuntabilitas sistem PBB dalam pekerjaannya dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women berusaha untuk bergabung dengan upaya bagian lain dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Dana Anak-anak

⁶ UN Women “*UN Women Staff Welcomes Michelle Bachelet*” Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/9/un-women-staff-welcomes-michelle-bachelet> pada 9 Mei 2022.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNICEF*), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNDP*), dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNFPA*), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNESCO*), Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNHCR*), Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*FAO*). Semua akan tetap melanjutkan sinergi untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang dan profesinya.⁷

4.1.2 Peran dan Tujuan UN WOMEN

Majelis Umum PBB menyetujui dibuatnya Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (*UN Women*) pada tahun 2010. Yang mana tujuan dari organisasi internasional yang dibentuk tersebut (*UN Women*) yaitu, untuk melajukan perkembangan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang terdapat pada penjuru dunia. Hak asasi manusia atas kesetaraan yang terdapat pada anak perempuan dan perempuan bukan merupakan hal yang mendasar, tetapi terdapat bagian dari kepentingan sosial dan ekonomi. Ketika perempuan dididik dan

⁷ United Nations. "*Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others*". Diakses melalui: <https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/> pada 9 Mei 2022.

diberdayakan, kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih aktif dan kuat, sehingga dalam kehidupan sosial mereka lebih damai dan konsisten.⁸

Agar dapat mencapai tujuan, UN Women menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Yang mana peran utamanya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW), dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.
2. Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis maupun keuangan yang cocok untuk negara-negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
3. Untuk memungkinkan negara-negara anggota untuk memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri tentang kesetaraan gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan.⁹

4.1.3 Program Kerja UN WOMEN

⁸ United Nations Department of Public Information. *“Basic Fact About the United Nations”* (the United Nations Department of Public Information: New York, 2011). Diakses melalui <http://munkiconference.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15422056/basic-facts-about-the-un.pdf> pada 9 Mei 2022.

⁹ *“About UN Women”*, *Loc.cit.*

Suatu organisasi yang mapan harus memiliki program kerja untuk menggapai tujuannya. Program yang terdapat pada UN Women sudah berlangsung di setiap Negara Anggota dan membentuk kerangka kerja regional, program UN Women sedang dilaksanakan melalui undang-undang, kebijakan, tindakan, layanan dan implementasi, dan melalui kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta. Ditingkatkan dan dipromosikan. Untuk memenuhi mandat, UN Women berfokus pada program-program di bidang-bidang berikut:¹⁰

1. Kepemimpinan dan Partisipasi Politik

Resolusi Majelis Umum PBB 2011 dalam kontribusi perempuan dalam menjadi pemimpin politik menyatakan: di setiap bagian universe ini rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan dampak kemiskinan yang tidak proporsional terhadap perempuan adalah hasil dari undang-undang, praktik, perilaku dan perspektif yang diskriminatif kepada perempuan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan kemiskinan yang tidak seimbang terhadap kaum perempuan.

Salah satu strategi bersejarah UN Women adalah mendorong kontribusi perempuan dalam kepemimpinan politik sesuai dengan Konvensi CEDAW. Platform Aksi Beijing juga menghilangkan segala bentuk hambatan partisipasi politik perempuan. Untuk dapat meraih tujuan, UN Women memberikan training bagi

¹⁰ UN Women. "What We Do". Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/what-we-do> pada 9 mei 2022.

pencalon politik perempuan, mendukung pemberdayaan perempuan dan menawarkan kampanye kesadaran politik tentang kesetaraan gender. UN Women mendukung para pembela untuk kesetaraan gender dengan menyerukan kepada partai politik dan pemerintah lain untuk memainkan peran mereka dalam memberdayakan perempuan. Inisiatif lain mendorong para pemuda untuk mengadvokasi kebijakan kesetaraan gender di jantung pembuatan kebijakan publik. Pembela Perempuan PBB untuk Reformasi Legislatif dan Konstitusi memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang adil ke arena politik sebagai yang memilih calon petinggi terpilih dan pegawai negeri. UN Women akan berkolaborasi dengan negara dari bagian PBB lainnya dan penduduk setempat untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dalam pemilihan, termasuk kemampuan untuk memilih dalam pemilihan dan kemampuan untuk memilih tanpa kekerasan dalam pemilihan.¹¹

2. Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Perempuan

Kesetaraan gender bukan hanya tentang menyudahi kekerasan. Pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan menjadi kunci keberhasilan negara. Pendanaan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan jalan cepat mencapai kesetaraan gender, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perempuan membuat dampak yang signifikan terhadap ekonomi dalam bisnis, pertanian, sebagai pengusaha dan pekerjamelalui pekerjaan perawatan yang tidak

¹¹ Ibid

dibayar di rumah. Namun, keseluruhan dari mereka masih secara tidak wajar dipengaruhi oleh pengeksploitasian terhadap kemiskinan dan diskriminasi.

Pembedaan terhadap gender, seringkali ditemui dimana perempuan dengan pekerjaan yang tidak aman dan upah rendah tidak sama rata. Ini memutuskan akses terhadap kapital ekonomi. Dengan demikian, perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan tidak mempunyai waktu yang luang untuk mengejar peluang ekonomi lebih besar.¹²

Bekerjasama bersama mitra yang lainnya, UN Women meningkatkan skill perempuan agar menemukan pekerjaan pantas dan mempunyai pengaruh dalam institusi serta peraturan publik yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Semua program pemberdayaan ekonomi Perempuan PBB melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk menjangkau perempuan yang sangat membutuhkan bantuan mereka. Khususnya kelompok yang terasingkan termasuk perempuan pedalaman, asisten rumah tangga, imigrandan perempuan disabilitas. Yang bertujuan dalam meningkatkan pendapatan, akses dan kontrol yang lebih baik atas sumber daya, dan peningkatan keamanan, termasuk perlindungan dari kekerasan.¹³

3. Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

¹² UN Women. "Economic Empowerment". Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/what-wedo/economic-empowerment>. pada 12 mei 2022.

¹³ Ibid

Kekerasan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dimana rumah dan tempat publik juga bisa terjadi kekerasan. Kekerasan mempunyai macamnya seperti, pelecehan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual dalam pembunuhan terkait gender. Dampak dari perilaku kekerasan dapat mempengaruhi keadaan psikologis jangka pendek dan jangka panjang dari wanita dan anak-anak dan berujung kematian. Fenomena merupakan perilaku negatif pada kesejahteraan umum dan menghalangi perempuan untuk berpartisipasi masyarakat. Perilaku kekerasan juga dapat mempermalukan keluarga mereka. Masyarakat dan negara pada kenyataannya membutuhkan sejumlah besar uang agar bisa menyelesaikan perkara ini, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya litigasi atas hilangnya produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada anggaran negara.¹⁴

Setiap negara memiliki undang-undang dan pedomannya sendiri untuk menangani kejahatan dengan kekerasan. Tetapi dalam penerapannya akan terdapat tantangan langkah-langkahnya. Banyak perempuan masih kekurangan akses dalam pelayanan dan sektor seperti kesehatan, polisi, keadilan dan dukungan sosial untuk memastikan perlindungan dalam kesejahteraan, dan penghentian kekerasan yang terus-menerus. Hak perempuan untuk agar bisa hidup bebas dari kekerasan ditegaskan oleh konvensi internasional seperti (*CEDAW*). dalam tingkatan internasional, UN Women akan berupaya memajukan peraturan internasional, dengan mendukung Majelis Umum

¹⁴ UN Women. "*Ending Violences Against Women*". Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/what-wedo/ending-violence-against-women>. pada 13 Mei 2022.

PBB dan Komisi Status Perempuan, dengan agenda pembangunan pasca-2015 mencakup tujuan konkret untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.¹⁵

UN Women membantu pemerintah meloloskan dan menerapkan pembaruan legislatif yang memenuhi standar internasional. UN Women bermitra dengan pemerintah, organisasi lokal, dan instansi lain dalam mengakhiri kekerasan. UN Women juga melakukan pengiklanan kebutuhan untuk mengubah norma dan perilaku laki-laki dan membela kesetaraan gender untuk hak-hak perempuan. UN Women akan berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun perencanaan gerakan nasional khusus dalam mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan, dan memperkuat koordinasi berbagai aktor yang dibutuhkan dalam melakukan aksi berkelanjutan.¹⁶

4. Menjaga Perdamaian dan Keamanan

Partisipasi perempuan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan sangat diperlukan untuk mendirikan perdamaian berkelanjutan. Di tahun 2001 tanggal 31 Oktober, DK Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan resolusi 1325, mengenai perempuan, *peace* dan *security*. Resolusi tersebut memiliki empat pilar: pencegahan, kontribusi, perlindungan dan pembentukan perdamaian dan pemulihan. Dengan resolusi ini, perempuan di penjuru dunia dapat memimpin aksi perdamaian.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

Keberadaan bukti akurat mengenai kontribusi perempuan dalam proses perdamaian pasca-konflik memiliki dampak yang lebih tahan lama. Walaupun, kebanyakan perempuan tidak terlihat dan dipinggirkan dari proses perdamaian dan negosiasi. Berdasarkan hal ini, dalam menanggapi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, UN Women mendukung perempuan dari semua hal agar bisa berkontribusi dalam proses perdamaian, mencegah konflik dan membangun perdamaian.¹⁷

UN Women dipandu oleh delapan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2222 dan 224 serangkaian Agenda normatif terkait untuk Perempuan (CEDAW), sebuah kerangka kerja yang membentuk Platform Beijing. UN Women memimpin pelaksanaan Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan (WPS) melalui inisiatif penelitian, mengumpulkan data, *study exchange* dan mendokumentasikan aksi terbaik untuk menginformasikan kebijakan dan program.¹⁸

Demi menggapai dan memaksimalkan semua tujuan usaha perdamaian dan memastikan bahwa perempuan dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang melanggar HAM, UN Women telah mencapai perubahan transformatif dengan bekerja di bidang-bidang berikut:

¹⁷ UN Women. "Peace and Security". Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-andsecurity> pada 13 Mei 2022.

¹⁸ Ibid

1. Mediasi dalam melakukan penanganan konflik (*Mediation and conflict prevention*)
2. Menciptakan perdamaian dan perawatan (*Peacebuilding and recovery*)
3. Perdamaian (*Peacekeeping*)
4. Mengakhiri pembebasan hukum (*Ending impunity*)
5. Melawan tindakan ekstrim (*Countering violent extremism*)
6. Rencana aksi nasional (*National Action Plans*)
7. Koordinasi dan pelaporan PBB (*UN coordination and reporting*)
8. Keterlibatan dengan Dewan Keamanan (*Engagement with the Security Council*)
9. Pendanaan Katalytic (*Catalytic funding*).¹⁹

UN Women akan mendorong kesetaraan gender dalam pelaksanaan peran perempuan mengenai keamanan serta perdamaian, khususnya dengan mendukung partisipasi perempuan dalam perdamaian, resolusi konflik dan proses kemanusiaan pasca konflik, dan dengan mendorong partisipasi berbagai instansi hukum agar Mendukung Biro Kesetaraan terhadap penjahat kekerasan.

5. Aksi Kemanusiaan

Saat krisis melanda, membuat perbedaan dalam hidup manusia dalam sekejap. Kematian, deportasi dan perusakan infrastruktur mempengaruhi semua kelas sosial.

¹⁹ Ibid

Akibat dari krisis berdampak pada perempuan dan anak-anak dari segala usia. Oleh karena itu, ada perbedaan dalam kebutuhan, begitu pula sumber daya, kemampuan, dan strategi. Seringkali perempuan menjadi yang pertama mengalami krisis dan memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup dan bertahan dalam keadaan sosial.²⁰

UN Women berperan dalam penanganan dan mengatasi konflik melalui kegiatan preskriptif yang membantu Negara Anggota dan PBB dalam pengembangan dan penerapan kebijakan serta pemrograman di lapangan. Tugas UN Women dalam divisi ini terdapat tiga program dalam operasionalnya: pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons krisis.²¹

6. Keterlibatan Pemuda pada kesetaraan gender (*Youth and gender equality*)

UN Women's Gender Equality and Youth Strategy merupakan respon penting agar dapat mengembangkan keterlibatan kaum muda untuk memperkuat kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Orang-orang muda di seluruh dunia membuat kehadiran mereka dikenal dan mengangkat suara mereka untuk masa depan manusia dalam bermasyarakat. Populasi pemuda yang ada di dunia telah mencapai 1,8 miliar, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangkitnya para pemuda

²⁰ UN Women. "Humanitarian Action". Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/what-wedo/humanitarian-action> pada 14 Mei 2022.

²¹ Ibid

adalah kesempatan yang sangat menguntungkan untuk memanfaatkan bakat dan keterampilan mereka untuk memajukan tujuan pembangunan global dan nasional.²²

UN Women membuat strategi multilateral yang tidak hanya dipergunakan untuk meninjau bentuk pembelaan dan keterlibatan tradisional, tetapi juga teknologi dalam pendekatannya untuk melibatkan pria dan wanita muda. Strategi UN Women mencakup peningkatan kemitraan dengan lembaga yang lebih luas, mobilisasi keahlian, dan pemantauan serta penilaian aktif. Strategi Kesetaraan Gender dan anak muda UN Women diperluas dengan kajian mendalam dan serentetan konsultasi yang menyertakan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk perwakilan dari sektor publik dan swasta serta penduduk setempat.²³

Untuk mendapatkan sudut pandangan yang beragam dari penjuru dunia, UN Women membentuk *Youth Working Group* yang terdiri dari perwakilan pemuda pada tingkat negara, wilayah, dan kantor utama. Mereka terus terlibat dalam semua tahap proses perluasan strategi. Rancangan strategi kemudian dipresentasikan kepada pemangku kepentingan domestik, termasuk Kelompok Kerja Pemuda, diikuti dengan rancangan revisi yang didistribusikan ke khalayak PBB yang lebih luas melalui Jaringan Antar Badan Pengembangan Pemuda.

²² UN Women. "Youth and gender equality". Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-wedo/youth> pada 17 mei 2022.

²³ Ibid

Melalui serangkaian upaya konsultasi online dan offline dengan berbagai mitra masyarakat sipil, khususnya organisasi pemuda dan organisasi sektor swasta yang dipimpin oleh pemuda, pandangan para ahli di lapangan harus digabungkan dan dikoordinasikan untuk meningkatkan dukungan bagi strategi pemuda untuk kesetaraan gender dalam Badan Pemuda dan Sektor Publik.²⁴

7. Perencanaan Nasional dan Pemerintahan

Hal yang menjadikan faktor dalam ketidaksetaraan gender merupakan gagal nya pemerintah, yang mana pemahaman pemerintah dalam melihat keterikatan terhadap kesetaraan gender di lihat melalui kewajiban, agenda, peraturan, lembaga dan pendanaan dalam negara nya. UN Women menyokong dalam membangun ketimpangan antara rencana perluasan nasional serta strategi kesetaraan. Agar dapat mengubah instansi publik, UN Women membantu dalam penguatan daya tampung pekerja sipil dalam menggabungkan rencana dan anggaran serta pemilihan indikator performa untuk pemantauan.²⁵

UN Women mengadvokasi pendanaan publik yang terbuka serta layak untuk kesetaraan gender, tercatat dalam penerapan anggaran gender yang menyediakan sarana yang memadai untuk perempuan dan laki-laki. Bekerja sama bersama para pendukung kesetaraan gender, kita dapat memperkuat kemampuan kita dalam pengaruh pengambilan keputusan publik dan menuntut pembuktian dari pemerintah.

²⁴ Ibid

²⁵ UN Women .”*Governance and national planning*”. Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning> pada 17 mei 2022.

Di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsamengenai Hak-Hak Perempuan, dan di tempat lain, UN Women berperan penting dalam mendukung kerangka normatif yang terkuat agar bisamembiayai kesetaraan gender dan memperkuat kapasitas dan akuntabilitas dalam publik. Mitra kami meliputi kementerian keuangan, perencanaan dan sektor, pemerintah daerah, anggota parlemen, kelompok masyarakat sipil dan lembaga akademis. Jangkauan penyedia dukungan untuk memandu kebijakan dan mekanisme koordinasi untuk mencapai kesetaraan gender.²⁶

8. Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai lembaga organisasi ternama dengan tugas menyeluruh untuk memajukan kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan, UN Women telah menetapkan kerangka pembangunan pasca-2015 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*). Menyerukan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender di dalam pengarusutamaan pertimbangan gender di semua bagian kerangka kerja yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada tahun 2015 membuka jalan bagi kemajuan yang berkelanjutan. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting bagi semua Negara Anggota. Hanya

²⁶ Ibid

dengan membuathak-hak perempuan dan anak-anak di semua tingkatan adil dan melestarikan lingkungan bersama untuk generasi mendatang.²⁷

UN Women menyampaikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk menciptakan sasaran kesetaraan gender dan pemberdayaan kepada semua wanita. keseluruhan ini berisi sembilan tujuan yakni:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan, baik publik maupun swasta, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktek yang merugikan seperti pernikahan anak, pernikahan dini, pernikahan paksa dan sunat perempuan. .
4. Mengakui dan menghargai perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan langkah-langkah perlindungan sosial, dan promosi pembagian tanggung jawab yang tepat secara nasional di dalam rumah dan keluarga.
5. Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat kehidupan politik, ekonomi, dan publik.

²⁷ UN Women. “*The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development> pada 18 mei 2022.

6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi sebagaimana disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing dan dokumen hasil Konferensi Peninjauannya.
7. Melaksanakan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, akses ke properti, tanah dan bentuk properti lainnya, jasa keuangan, warisan dan pengelolaan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional
8. Peningkatan penggunaan teknologi bantu, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk memfasilitasi penentuan nasib sendiri perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan legislasi yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.²⁸

Adanya target tujuan dari ke 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) supaya perempuan dan anak perempuan, di mana pun memiliki hak dan kesempatan yang sama, serta dapat hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

9. HIV/AIDS

UN Women membawa perspektif kesetaraan gender dan hak asasi manusia untuk bekerja pada perempuan dan HIV dan AIDS. Melalui rencana perintis yang

²⁸ UN Women, “SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls”. Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality> pada 20 Mei 2022.

menunjukkan keterkaitan atas faktor yang menjadi pendorong cepatnya penyebaran penyakit seperti, kekerasan berdasarkan gender (perempuan), menolak hak hukum dan peran perempuan yang terbatas dalam pembuatan keputusan. Satu-satunya strategi yang diutamakan adalah untuk pemberdayaan perempuan, melindungi mereka dari infeksi, menganangani penistaan dan memastikan hak-hak mereka untuk dapat menggunakan akses terhadap perawatan.²⁹

Program UN Women dalam arahnya menggunakan standar global dan norma. Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Politik 2016 tentang HIV dan AIDS: langkah aktif untuk melawan HIV dan Mengakhiri Epidemi AIDS pada tahun 2030 melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Melawan Perempuan (CEDAW), Platform Beijing untuk Aksi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada Juni 2012, UN Women menjadi lembaga sponsor ke-11 UNAIDS.³⁰

4.1.4 UN Women Pakistan

Pakistan bergabung dengan PBB pada 30 September 1947, ketika Pakistan memperoleh kemerdekaan. Keterlibatan UN Women di Pakistan terjalin sejak adanya ratifikasi *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1993. Sejak di resmikannya UN Women sebagai salah satu agenda PBB, UN Women telah mendirikan kantor pusatnya di Pakistan yang

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

berbasis di Islamabad. UN Women di Pakistan bekerjasama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, sektor publik dan swasta untuk menangani prioritas nasional mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi inti dari perencanaan dalam Agenda 2030 untuk *Sustainable Development*, UN Women di Pakistan mitranya bekerjasama agar dapat membuktikan sebagai berikut:

1. Lingkungan yang memungkinkan untuk menerjemahkan, memantau dan melaporkan pelaksanaan komitmen kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Rencana, kebijakan, dan sistem pemerintahan yang responsif gender dengan lembaga-lembaga yang lebih mudah diakses dan dilaksanakan secara setara bagi perempuan dan anak perempuan
3. Lingkungan di mana perempuan mendapat manfaat dari pekerjaan yang layak, jaminan pendapatan dan pembangunan sosial-ekonomi
4. Lingkungan yang aman di mana perempuan dan anak perempuan dapat menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan di ruang pribadi dan publik, dan para penyintas dapat mengakses layanan penting yang berkualitas

Sebagai pemandu dalam melaksanakan tugas UN Women di Pakistan mempunyai berbagai Prinsip-prinsip, yaitu:

1. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan tidak meninggalkan siapa pun

2. Kepemilikan nasional dan lokal selaras dengan prioritas
3. Memanfaatkan manfaat yang saling menguatkan
4. Bertindak sebagai katalis dan mempromosikan koherensi PBB
5. Akuntabilitas untuk hasil, transparansi, dan efektivitas biaya.³¹

4.2 Kondisi Objektif Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan

4.2.1 Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan

Negara Pakistan didirikan pada tahun 1947, dengan Islam sebagai landasan dasar negara yang merdeka. Pakistan juga memasukkan Syariah (hukum Islam) dan hukum perdata sebagai dasar hukum negara. Penggabungan Syariah dengan hukum perdata di Pakistan sebenarnya telah menyebabkan kegiatan ke arah ekstrem dengan alasan Islam untuk membenarkan kesalahan terkait kegiatan kekerasan berbasis gender. Sementara dalam ajaran Islam, didalamnya memperkenalkan kesetaraan gender bagi perempuan, kebiasaan dan adat istiadat beberapa negara, termasuk Pakistan, menunjukkan sebaliknya. Informasi tentang agama di Pakistan menjadi populer dan menyatu dengan patriarki, dimana apabila ada yang menentang patriarki akan dipandang bertentangan dengan hukum Islam, mengakibatkan stigma buruk

³¹ UN Women. "About". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/about> pada 20 Mei 2022.

menentang patriarki sulit dihilangkan karena sebagian besar masyarakat Pakistan telah menaturalisasi patriarki dan agama sebagai identitas individu dan kolektif.³²

Pakistan merupakan negara dengan peringkat kekerasan berbasis gender yang tinggi. Terlepas dari undang-undang dan peraturan kekerasan berbasis gender, tingkat kekerasan berbasis gender di Pakistan masih termasuk tinggi. Masalah kekerasan berbasis gender adalah hal yang krusial di Pakistan, dan insiden meningkat antara 2018 dan 2021. Meskipun mayoritas korban merupakan perempuan, tidak dapat disangkal bahwa anak perempuan bisa menjadi korban. Kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan di Pakistan tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di komunitas dan tempat kerja mereka. Pelaku kekerasan berbasis gender merupakan anggota keluarga perempuan, baik suami maupun anggota keluarga lainnya.³³

Situasi ekonomi dalam masyarakat Pakistan juga dikuasai oleh laki-laki, yang mengendalikan lembaga, memiliki sebagian besar properti, menuntun kegiatan ekonomi, menetapkan nilai aktivitas produktif yang berbeda dari pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sampingan, serta pelarangan dalam bekerja. Akibatnya, perempuan terutama yang sudah menikah hanya bisa bergantung pada suami dan anggota keluarga laki-laki tanpa memiliki akses yang bebas untuk mereka sendiri.

³² Khan, A. Pakistan: A Rising Women's Movement Confronts a New Backlash. The United States Institute of Peace, 1–4. <https://www.usip.org/publications/2021/03/pakistanrising-womens-movement-confronts-new-backlash> pada 21 mei 2022.

³³National Institute of Population Studies (NIPS), & ICF. (2019). Pakistan Demographic and Health Survey Demographic and Health Survey. Diakses melalui: <https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR354/FR35> pada 21 Mei 2022.

Terlebih lagi, penguasa Pakistan yang dipengaruhi kontrol laki-laki telah membantu mengabadikan kekerasan berbasis gender dan ketimpangan gender. Yang mana menurut mantan PM Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa kekerasan seksual sedang meningkat di Pakistan, disebabkan pakaian yang dikenakan oleh perempuan Pakistan. Dan juga melanjutkan perkataannya bahwa perempuan harus menyembunyikan tubuhnya untuk menghindari godaan dari masyarakat yang melihatnya.³⁴ Seperti kasus yang terjadi pada September tahun 2020, seorang perwira polisi yang sudah senior menuduh seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, dimana ia diperkosa beramai-ramai di depan kedua anaknya yang kondisi saat itu adalah malam hari, merespon laporan tersebut perwira polisi senior hanya menanggapi dengan perkataan bahwa perempuan tidak boleh pergi jika tidak ada laki-laki yang menemani.

Pada tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP). Terdapat 118 insiden KTP dilaporkan di Balochistan selama 11 bulan tahun 2019, sementara 70 perempuan dan 11 laki-laki terbunuh, dimana 43 perempuan dan 9 laki-laki tewas. Atas nama kehormatan, KDRT dan masalah rumah tangga memaksa 17 perempuan bunuh diri, 13 perempuan menghadapi penyiksaan dalam rumah tangga; 28 kasus pembunuhan; 4 wanita diculik; 3 wanita dilempar asam dan 1 insiden ancaman terhadap wanita dilaporkan. Laporan ini mengkategorikan insiden kekerasan

³⁴ Ahmed, M.. *Pakistan Prime Minister Imran Khan Blames Women for Sexual Violence*. Diakses melalui: <https://thediplomat.com/2021/06/pakistan-primeminister-imran-khan-blames-women-for-sexualviolence/> pada 21 Mei 2022.

berdasarkan sifat kekerasannya. Yang dikategorikan sebagai pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, luka dan cedera tubuh, penculikan, bunuh diri, pemukulan, pembakaran, pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, pembunuhan 'kehormatan', dan segala jenis kekerasan lainnya.

Dari Januari hingga Desember 2020, 2.297 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan di empat provinsi dan 25 distrik di Pakistan. Terkait peristiwa kekerasan berbasis gender yang mengacu pada kekerasan terhadap perempuan, seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan/pemerkosaan geng, pembunuhan demi kehormatan (*honour killing*) bunuh diri, dan insiden kekerasan terhadap perempuan lainnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mas kawin, kekerasan yang melibatkan penggunaan asam, warisan, perkawinan anak dan kawin paksa.³⁵

Pakistan memiliki 15 distrik dengan tingkat kekerasan berbasis gender tertinggi. Sebagian besar insiden kekerasan berbasis gender di Pakistan terjadi di distrik Lahore, sebanyak 399 kasus, diikuti oleh 382 distrik Kolangi dan 280 di distrik Nankanah Saheb. Sekitar 10.070 kasus kekerasan berbasis gender (termasuk kekerasan terhadap perempuan) telah terjadi di 120 distrik Pakistan melalui pengawasan ekstensif dan pemindaian media yang selektif. Dengan hadirnya pandemi COVID-19 di Pakistan telah memperburuk perilaku kekerasan terhadap perempuan pada fase yang membahayakan. Hal tersebut disebabkan kehampaan atas nilai

³⁵ Aurat Foundation. *Violence against Women & Girls in the Times of Covid-19 Pandemic*. Diakses melalui: <https://www.af.org.pk/PDF/VAW Reports AND PR/VAWG Report 2020.pdf> pada 22 Mei 2020.

kebaikan, kebudayaan serta kekeluargaan, acap kali digunakan dalam melakukan kegiatan kebudayaan yang membahayakan. Pada Juli 2020 menandai kasus tertinggi dari berbagai macam kekerasan berbasis gender di Pakistan, dengan jumlah 326 kasus.³⁶Dalam kasus kekerasan berbasis gender di Pakistan jumlah kasus yang terjadi sangat kurang dilaporkan, sehingga tidak ada cara untuk membuat perkiraan yang tepat.

Salah satu korbannya adalah Noor Muqaddam (27) yang merupakan seorang putri mantan duta besar Pakistan. Ia disiksa dan dipenggal di Islamabad pada 20 Juli 2021. Menurut laporan media setempat, tersangka utamanya adalah Zahir Jaffer yang merupakan salah satu keluarga terkaya di Pakistan. Penyebab di tahan nya muqqadam karean menolak menikah dengannya. Ia menahan Muqaddam selama tiga hari di kediaman nya. Ketika perempuan itu mencoba kabur, petugas keamanan dan tukang kebun menutup gerbangnya. Orangtua Jaffer juga dituduh terlibat dalam kejahatan itu karena mereka mengetahui Noor disekap di luar keinginannya, tetapi tidak melaporkannya ke polisi. Pembunuhan Noor Muqaddam oleh pria yang dikenalnya dengan latar kelompok yang sama, yaitu masyarakat kelas atas.³⁷

Kasus lainnya menimpa Ayesha Akram, seorang kreator TikTok di Pakistan. Ia dilecehkan dan diraba-raba oleh sekitar 400 lelaki ketika sedang memfilmkan orang-orang yang merayakan Hari Kemerdekaan Pakistan pada siang hari 14 Agustus 2021

³⁶ Ibid

³⁷ BBC. *"Kasus pemenggalan perempuan yang menolak dilamar, mengapa perkara ini mengundang kemarahan di Pakistan"*. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60489081> pada 23 Mei 2022.

di Taman Iqbal di Lahore. Dimana kerumunan orang sangat besar dan mereka memanjat pagar dan datang kearahnya. Kemudian lalu mendorong dan menarik sehingga pakaian nya menjadi robek. Akram mencoba melarikan diri dari para pria itu, tetapi diangkat dari tanah dan dilempari benda-benda serta mengatakan cincin dan anting-antingnya dirampas. Sebuah ponsel, kartu identitas dan uang tunai juga diduga dicuri dari salah satu temannya.³⁸ Pada hal ini menjadi jelas bahwa kehadiran virus COVID-19 mempunyai pengaruh dalam peningkatan tindak kekerasan berbasis gender.

Adapun di bawah ini merupakan merupakan macam-macam kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan, di antaranya yaitu:

1. Kekerasan Sexual

Kekerasan seksual mengacu pada komentar, gerak tubuh, atau kontak fisik yang bersifat seksual yang disengaja, berulang, dan tidak diinginkan. Sebagian besar korban pelecehan seksual adalah perempuan. Ada dua alasan utama untuk itu, yaitu, budaya dan struktural. Pertama, budaya pada masyarakat cenderung mendorong laki-laki untuk asertif secara seksual dan melihat perempuan secara ketentuan seksual. Akibatnya, interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dengan mudah bernuansa seksual.

³⁸ Muhaimin. "Bintang TikTok Ini Alami Pelecehan Seksual dan Diserang saat Syuting". Diakses melalui: <https://news.okezone.com/read/2021/08/21/18/2458885/bintang-tiktok-ini-alami-pelecehan-seksual-dan-diserang-saat-syuting> pada 20mei 2022.

Kedua adalah alasan struktural. Sifat gender dari tempat kerja dan sistem pendidikan di mana biasanya laki-laki berada dalam posisi mempunyai kekuasaan atas perempuan, melecehkan perempuan secara seksual. Pada masyarakat Pakistan Bos laki-laki melakukan pelecehan pada karyawan perempuan, atau profesor laki-laki melecehkan seorang mahasiswi atau karyawan. Dimana perilaku ini dilakukan secara sadar karena mereka menyadari bahwa wanita bawahan merasa sulit untuk menolak perilaku seksual mereka karena takut akan pembalasan yang bisa jadi pegawai wanita bisa dipecat atau tidak dipromosikan, sedangkan pada mahasiswi bisa mendapat lulusan yang buruk. Pelecehan seksual adalah hal biasa di Pakistan. Ketika wanita keluar rumah, mereka melalui penetrasi mata laki-laki yang menganggap perempuan sebagai mainan seksual untuk kesenangan mereka. Dari lingkungan dan koloni mereka sendiri ke public transportasi, dari sekolah ke pusat kejuruan, dari tempat kerja ke pusat perbelanjaan, perempuan menghadapi kekerasan seksual di Pakistan.³⁹

2. Kekerasan Domestik

Kekerasan Domestik atau Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang sangat umum dialami secara diam-diam oleh banyak perempuan di Pakistan. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan secara fisik, seksual atau psikologis yang dilakukan terutama (tetapi tidak hanya) oleh laki-laki terhadap

³⁹Abdul Hadi. *Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan*. European Journal of Social Sciences Education and Research. Vol.10 Nr. 2. Hlm.5. diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/318536680_Patriarchy_and_Gender-Based_Violence_in_Pakistan pada 25 Mei 2022.

perempuan dalam suatu hubungan atau setelah perpisahan. Di Pakistan karena sistem keluarga bersama adalah umum, dalam hukum juga merupakan pelaku umum kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan masalah mas kawin atau perselisihan keluarga.

Masalah dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan ini adalah merupakan kasus yang jarang dilaporkan, seringkali diperlakukan sebagai urusan rumah tangga pribadi, karena laki-laki menganggap hak mereka untuk mengancam atau melakukan kekerasan fisik terhadap istri mereka sebagai perilaku korektif ketika perempuan dianggap tidak patuh. Ironisnya, dalam kebanyakan kasus KDRT perempuan bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami bentuk pelecehan di tangan pasangannya dan memperlakukan KDRT sebagai perilaku yang diterima secara sosial. Secara keseluruhan, 39% wanita pernah kawin berusia 15-49 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik atau emosional dari pasangannya. 52% wanita Pakistan yang mengalami kekerasan tidak pernah mencari bantuan atau memberi tahu siapa pun tentang kekerasan tersebut. Selanjutnya, hanya 10% perempuan yang menyatakan bahwa tidak melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak patuh atau menolak melakukan hubungan seksual dengan suami tidak membenarkan kekerasan fisik.⁴⁰

3. Kekerasan Menggunakan Zat Asam

⁴⁰ Kanwal Qayyum. Domestic violence against women: prevalence and men's perceptions in PGRN districts of Pakistan. (Islamabad: Rutgers WPF, 2013). Hlm. 10-33.

Kekerasan asam menghadirkan serangkaian masalah unik di Pakistan dan karena konsekuensinya yang brutal dan mengerikan bagi para korban. Bentuk kekerasan ini melibatkan dengan sengaja menyemprotkan, melemparkan atau menuangkan asam ke wajah dan tubuh korban, seringkali dengan maksud untuk menodai secara permanen dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang ekstrem bagi korban. Efek dari serangan tersebut termasuk rasa sakit fisik, kebutaan, hilangnya fitur wajah, penderitaan mental yang parah dan sebagai konsekuensi dari efek marginalisasi korban di masyarakat. Korban harus menjalani berbagai operasi untuk mengembalikan bentuk wajah mereka. Dalam kebanyakan kasus, pelaku serangan semacam itu sangat dikenal oleh para korbannya. Serangan semacam itu biasanya dimotivasi bukan dengan maksud membunuh korban, tetapi menyebabkan rasa sakit fisik dan trauma emosional yang parah untuk alasan seperti penolakan cinta, lamaran pernikahan atau seks atau perselisihan tentang pernikahan dan mas kawin.⁴¹

4. Honour Killing

Pembunuhan demi kehormatan di Pakistan adalah bagian dari kekerasan berbasis gender sebagai praktik yang berbahaya. Tindakan kekerasan ini disebut pembunuhan *Honour Killing* karena pembunuhan tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga derajat dan harga diri keluarga. Yang dimaksud dengan kehormatan adalah pembunuhan dalam keluarga dilakukan atas dasar bahwa keluarga korban

⁴¹ Shafaq Asmat. "Violence Against Women: Actual Situation In Pakistan And Effective Measures To Fight Against it". Diakses melalui: <https://courtingthelaw.com/2016/02/03/commentary/violence-against-women-actual-situation-in-pakistan-and-effective-measures-to-fight-against-it/> pada 5 Juni 2022.

menganggap korban dibunuh demi kehormatan telah melakukan perilaku yang menyebabkan masalah berat dan sebagai sesuatu yang memalukan. Kebiasaan sosial dan budaya pada masyarakat Pakistan, perempuan hanya sebagai hak milik atau kekayaan dan sebagai simbol kehormatan milik anggota keluarga laki-laki, hal tersebut menentukan bahwa nasib dan pembelaan mereka berada pada anggota laki-laki dalam keluarga.

Apabila pada kenyataannya seorang korban honour killing tidak bersalah mereka tidak mempunyai hak dalam membela diri. Bahkan ketika mereka memprotes itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan sosial/agama dan mencemari keluarga. Jadi, alih-alih dikatakan sebuah pelanggaran atau bentuk kekerasan berbasis gender yang merusak harkat dan harga diri korban, khususnya perempuan, pembunuhan demi kehormatan justru merupakan bentuk hukuman yang tepat menurut masyarakat sebagai gambaran dari keputusan terbaik bagi mereka yang telah melanggar atau merusak kehormatan keluarga.⁴²

5. Adat dan Praktik Berbahaya

Pakistan juga memiliki budaya atau adat istiadat yang merugikan perempuan dan sebagian besar praktik budaya tersebut masih berlaku di Pakistan. Dimana yang paling terkena dampak dalam kegiatan berbahaya seperti kalakali, karo-kari, swara, vanni dan watta satta, adalah perempuan pedesaan karena sebagian besar masyarakat

⁴² Abdul Hadi. Op.cit. Hlm .4.

pedesaan masih menjalankan praktik adat sesuai kelompok etnis yang kuat. Meskipun laki-laki dalam praktik berbahaya ini juga bisa menjadi korban. Alasan mengapa kegiatan tersebut tetap berjalan hingga saat ini adalah kurangnya penegakan dalam hukum mengenai peraturan dalam melindungi perempuan di Pakistan.⁴³

Pada praktik swara tidak terbatas hanya di pernikahan anak. Bagaikan swara, vanni juga merupakan adat perkawinan anak yang dilakukan untuk mengakhiri konflik antar etnis dengan cara mengawinkan secara paksa anak perempuan. Praktik Vanni bisa dihentikan jika wanita itu dapat memberikan sejumlah uang yang disebut Diyat. Apabila tidak mampu, maka wanita itu harus membayar harga kejahatan dengan menghabiskan hidupnya dalam pernikahan tersebut. Sedangkan Watta Satta adalah adat istiadat di Pakistan untuk bertukar istri antar keluarga. Ketika pernikahan berlangsung kedua keluarga harus berganti istri, yang berarti antar keluarga harus mempunyai anak perempuan dan laki-laki, serta bersedia memasangkan mereka dengan anak perempuan dan anak laki-laki dari keluarga lain.

4.2.2 Faktor Penyebab Kekerasan Berbasis Gender di Paskitan

1. Sosial Budaya

⁴³ Aurat Foundation. "Violence Against Women (VAW) Annual Report 2014: Violence against women in Pakistan". Diakses melalui: <https://www.af.org.pk/PDF/VAW%20Reports%20AND%20PR/VAW%202014.pdf> pada 7 Juni 2022.

Masyarakat Pakistan secara normatif merupakan patriarki. Meskipun ini tidak berarti bahwa perempuan selalu dilecehkan dalam masyarakat, pemikiran patriarki dapat menciptakan masyarakat yang dimana perempuan dianggap oleh laki-laki maupun perempuan, sebagai lebih rendah dari pada laki-laki. Hal ini tidak hanya mengarah pada internalisasi psikologis kekerasan, tetapi juga menghambat perempuan untuk menuntut bagian yang adil dari sumber daya yang tersedia. Kurangnya kepentingan yang dikaitkan dengan pendidikan dan pekerjaan perempuan mengakibatkan penekanan yang berlebihan pada unit keluarga sebagai sumber perlindungan bagi semua perempuan. Lingkup domestik tetap privat dan berada di bawah posisi otoritatif laki-laki. Pandangan yang berlaku adalah bahwa kesucian unit keluarga tidak boleh dilanggar, bahkan jika hak istimewa keluarga melanggar hak dan perlindungan perempuan.

Dengan demikian, kekerasan dalam keluarga dianggap sebagai masalah personal, di mana negara tidak mempunyai hak untuk campur tangan. Banyak kasus terjadi di Pakistan di mana perempuan yang melaporkan kekerasan menghadapi tindakan pembalasan dari suami atau keluarga suami. Kekerasan tersebut dapat berupa fisik, mengakibatkan kematian atau kehilangan anak perempuan tersebut. Mengidentifikasi pernikahan dan struktur keluarga, kurangnya dukungan hukum dan masyarakat untuk perempuan, ketidaksetaraan gender, dan ketergantungan ekonomi perempuan pada

pasangan laki-laki mereka sebagai faktor kunci yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan.⁴⁴

2. Politik

Unsur sosial dan budaya konservatif, seperti dijelaskan di atas, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi politik di Pakistan. Kebangkitan partai-partai politik-agama masa lalu di Pakistan telah berdampak parah pada perempuan.⁴⁵ Menekankan identitas Islam nasionalis kolektif melalui retorika anti-Barat yang meluas telah menghasilkan penyebaran sikap anti-perempuan. Di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, undang-undang diterapkan, antara lain, melarang biro iklan menggunakan model wanita dalam iklan atau di papan reklame. Lebih jauh, beberapa orang percaya bahwa wanita tidak boleh terlihat di jalan tanpa pakaian Islami yang pantas. Wanita yang tidak mematuhi pakaian Islami dipandang sebagai orang Barat, cabul, dan vulgar serta menjadi sasaran pelecehan. Tempat penampungan perempuan ditutup di provinsi ini karena, menurut partai terkemuka, mempromosikan perzinahan dan kecabulan dan mendorong erosi unit keluarga.

Di wilayah dengan pandangan dunia seperti itu, solusi kekerasan terhadap perempuan secara sistematis mengurangi interaksi laki-laki-perempuan dengan menekankan segregasi jenis kelamin mengabaikan kekerasan yang terjadi di ranah

⁴⁴ Rabbani, F., Qureshi, F., & Rizvi, N. (2008). Perspektif tentang kekerasan dalam rumah tangga: Studi kasus dari Karachi, Pakistan. *Jurnal Kesehatan Mediterania Timur*, 14(2), 415–426.

⁴⁵ [Afiya Shehrbano Zia](#). Faith-based politics, enlightened moderation and the Pakistani women's movement. *Journal of International Women's Studies*, vol. 11 no.1. hlm. 225–245.

domestik. Pada pola pikir seperti itu tidak mengakui atau menempatkan nilai yang cukup pada kerentanan khusus perempuan atau kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Karena alasan ini, tidak ada sistem pemerintahan yang memadai (yaitu, kesehatan, hukum, pendidikan) untuk mencegah atau menangani kekerasan. Misalnya, untuk korban kekerasan seksual, hanya ada 51 petugas medico-legal (43 laki-laki/8 perempuan) di depan umum. Ini berarti bahwa hanya ada delapan petugas mediko-legal perempuan untuk 9 juta perempuan di Karachi.⁴⁶ Yang menggembirakan, pemerintah baru-baru ini mengesahkan RUU kekerasan dalam rumah tangga menjadi undang-undang (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pakistan, 2012), yang diharapkan akan bekerja untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menyoroti perlunya memperkuat sumber daya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

3. Ekonomi

Ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki mereka sebagai salah satu faktor penyumbang utama kekerasan terhadap perempuan. Faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan di Pakistan termasuk pendidikan rendah, dan akibatnya pekerja tidak terampil, status di antara laki-laki.⁴⁷

Kerentanan ekonomi perempuan juga mengurangi kemampuan mereka untuk

⁴⁶Aahung. Diperoleh dari <http://www.aahung.org/PUBLICATION.aspx> pada 11 Juni 2022.

⁴⁷Ali, T., Asad, N., Mogren, N., & Krantz, G. (2011). Kekerasan pasangan intim di perkotaan Pakistan: Prevalensi, frekuensi dan faktor risiko. *Jurnal Internasional Kesehatan Wanita*, 3,105-115.

berbicara menentang kekerasan, karena mereka tidak memiliki sistem pendukung yang memadai untuk kelangsungan hidup mereka. Norma sosial di Pakistan sangat melarang perempuan untuk hidup mandiri, terutama perempuan muda.

Akibat adanya kesempatan kerja yang terbatas, perempuan tidak punya banyak pilihan selain tetap berada di ranah domestik, di mana mereka menjadi sasaran kekerasan. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa wanita menganggap kontrol dan penolakan oleh suami dan mertua mereka sebagai hambatan utama untuk mengejar efikasi diri dan pengambilan keputusan keuangan, sosialisasi dengan wanita lain, dan pemberdayaan ekonomi.⁴⁸

4. Pendidikan

Kondisi pendidikan di Pakistan sangat buruk karena kapasitas membaca dan menulis sangat rendah. Orang tua di Pakistan bahkan termasuk yang paling buta huruf. Beberapa alasan terbawah kebiasaan masyarakat dalam kemampuan membaca huruf adalah tidak adanya kesadaran mengenai pendidikan. Jumlah anak yang terputus sekolah tertinggi kedua dalam UNESCO. Lebih dari 3 juta di antaranya adalah perempuan, hanya 5% anak perempuan yang bersekolah di sekolah dasar dan jumlah ini turun di tingkat sekolah menengah pertama menjadi 30%.⁴⁹

⁴⁸Karmaliani, R., Shehzad, S., Hirani, S.,. Memenuhi tujuan pembangunan milenium 2015 dengan intervensi baru untuk perempuan yang dilecehkan. *Klinik Keperawatan Amerika Utara*, 46, 485–493.

⁴⁹ European Parliamentary Research Service. 2013. "Girls Education in Pakistan-Malala Yousafzai". Diakses melalui

Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Oxfam dan Universitas Lahore, ada sebanyak 40 persen anak-anak Pakistan berasal dari keluarga miskin dan tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Hampir 60 persen anak-anak miskin di Pakistan tidak sekolah.⁵⁰ Dalam hal tersebut dapat di lihat bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor ketimpangan berdasarkan gender dan faktor ekonomi.

5. Psikologis

Budaya patriarki yang mengakar kuat di Pakistan telah memunculkan rasa hak di antara laki-laki terhadap perempuan. Ada gagasan yang diterima secara luas bahwa peran perempuan di dalam rumah harus pasif, tunduk, dan patuh. Kegagalan untuk memenuhi harapan ini dianggap layak dihukum, dalam bentuk berbagai jenis kekerasan. Skenario ini juga serupa di negara lain, termasuk Bangladesh, Kamboja, Meksiko, India, Nigeria, Papua Nugini, Nikaragua, Tanzania, dan Zimbabwe.⁵¹ Sayangnya, perempuan di Pakistan juga menganut pandangan dominan laki-laki, yang menginternalisasi perasaan bahwa perempuan membawa kekerasan pada diri mereka sendiri. Perubahan perilaku perempuan dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130677/LDM_BRI\(2013\)130677_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130677/LDM_BRI(2013)130677_REV1_EN.pdf) pada 11 Juni 2022.

⁵⁰Nurdiani Latifah. "Malala dan Catatan Suram Pendidikan Perempuan di Pakistan". Diakses melalui: <https://bincangmuslimah.com/kajian/malala-dan-catatan-suram-pendidikan-perempuan-di-pakistan-31992/> pada 13 Juni 2022.

⁵¹Heise, L., Ellsberg M., & Gottemoeller M. (1999). Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. *Laporan Kependudukan*. Baltimore, MD: Universitas Johns Hopkins.

Dalam kasus lain, banyak perempuan tidak melaporkan kekerasan karena ketergantungan, status hukum, sosial, dan ekonomi mereka yang lebih rendah dan karena ketakutan mereka akan konsekuensi, seperti meningkatnya pelecehan, dan rasa malu dan malu yang diakibatkannya. Nilai-nilai budaya dominan seperti itu sering dianut oleh petugas kesehatan serta pekerja sosial dan polisi yang karenanya tidak simpatik terhadap perempuan. Hal ini berkontribusi pada sulitnya pengentasan kekerasan terhadap perempuan.⁵²

Faktor penyebab kekerasan berbasis gender dalam masyarakat Pakistan disebabkan oleh konstruksi sosial dimana hal ini menghasilkan gender yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Merujuk dengan konsep gender, menurut Narwoko dan Suyanto, sikap yang tertanam dalam masyarakat Pakistan merupakan perilaku yang sudah dibentuk secara kultural. Terjadinya ketidakadilan gender, menyebabkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu seperti laki-laki terhadap perempuan yang disebabkan ketidaksetaraan kekuatan. Seperti bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Pakistan perempuan menjadi korban dalam perilaku kekerasan yang dilakukan baik laki-laki dalam keluarganya maupun diluar keluarga.

Dalam konsep gender terkait penyifatan sosial budaya menghasilkan stereotype pada perempuan yang menimbulkan perilaku masyarakat Pakistan dan

⁵²Mumtaz, Z., Salway, S., Waseem, M., & Umer, N. (2003). Hambatan berbasis gender untuk penyediaan perawatan kesehatan primer di Pakistan: Pengalaman penyedia perempuan. *Kebijakan dan Perencanaan Kesehatan*, 18(3), 261–269.

melanggengkan praktek-praktek adat berbahaya membuat sulitnya menghilangkan budaya patriarki, karena sebagian besar masyarakat telah menanamkan patriarki dan agama menjadi satu kesatuan identitas individu dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidaksetaraan yang ada pada masyarakat Pakistan merupakan bentuk dari marginalisasi, hal ini juga menyebabkan perilaku ketidakadilan gender pada perempuan di Pakistan membuat peran perempuan dalam masyarakat sebagai subordinat, sehingga status perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Merujuk dengan konsep Human Security menurut UNDP kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan sudah mengancam keamanan personal dan keamanan ekonomi, dimana banyak terjadi kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan domestic, penyiraman zat asam, honor killing, dan adat hingga praaktik berbahaya merupakan perilaku yang menghiraukan hak asasi manusia terlebih perempuan dalam masyarakat Pakistan. Dan juga adanya diskriminasi terhadap peran perempuan di Pakistan mengancam keamanan ekonomi karena membatasi ruang gerak perempuan sehingga menyebabkan kemiskinan, karena melarang perempuan Pakistan bekerja bahkan dalam penerimaan upah telah terjadi kesenjangan anatar upah laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini perempuan di Pakistan tidak mempunyai rasa aman dari ancaman yang mengganggu dan menyakitkan. Kondisi perempuan di Pakistan juga tidak adanya perlindungan dalam menentukan dan menjalani hidup tanpa rasa takut yang melanda.

4.2.3 Dampak Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan

Dampak kesehatan dari kekerasan berbasis gender terhadap kesehatan ialah mengenai masalah kesehatan mental wanita. Pelecehan terhadap wanita merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dan bahwa di Pakistan, jumlah wanita melebihi pria dalam melaporkan masalah kesehatan mental.⁵³ Pakistan melaporkan salah satu tingkat prevalensi tertinggi untuk morbiditas psikiatri di dunia, dengan 66% wanita Pakistan melaporkan depresi. Sebuah tinjauan sistematis literatur dari Pakistan menemukan bahwa rata-rata prevalensi keseluruhan gangguan kecemasan dan depresi adalah 34%.⁵⁴

Faktor-faktor yang berhubungan positif dengan kecemasan dan gangguan depresi ditemukan pada jenis kelamin perempuan di usia paruh baya, tingkat pendidikan yang rendah, kesulitan keuangan, menjadi ibu rumah tangga, dan masalah hubungan. Selanjutnya, pertengkaran dengan suami dan masalah hubungan dengan mertua berhubungan positif dengan depresi dan kecemasan. Wanita hamil menunjukkan melakukan kekerasan mestic sebagai prediktor signifikan dari kecemasan, depresi, dan ide bunuh diri.⁵⁵ Dalam sampel berbasis masyarakat yang lebih baru, kekerasan dalam rumah tangga secara positif terkait dengan variabel kesehatan mental. Dari 117 perempuan yang melaporkan kekerasan verbal atau fisik menemukan bahwa hampir 62% dari mereka melaporkan depresi akibat kekerasan dalam rumah tangga.

⁵³Rodriguez, MA, Heilemann, MV, Fielder, E., & Ang, A. (2008). Kekerasan pasangan intim, depresi, dan PTSD di antara wanita hamil Latina. *Annals of Family Medicine*, 6(1), 44–52.

⁵⁴Mirza, I., & Jenkins, R. (2004). Faktor risiko, prevalensi, dan pengobatan gangguan kecemasan dan depresi di Pakistan: Tinjauan sistematis. *Jurnal Medis Inggris*, 328, 1-5.

⁵⁵Asad, N., Karmaliani, R., dkk. (2010). Prevalensi pikiran dan upaya bunuh diri di antara wanita hamil Pakistan. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 89(12), 1545–1551.

Dampak kekerasan tambahan yang umum termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, infeksi menular seksual, gangguan stres pasca trauma (PTSD), dan kematian.⁵⁶ Efek kekerasan terlihat dalam masalah sosial dan perilaku pada anak-anak. Bukti yang tersedia menyoroti fakta bahwa kesulitan sosial membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan, semakin meminggirkan status perempuan dalam budaya di mana hanya ada sedikit pilihan yang tersedia bagi mereka.

Untuk alasan ini, wanita memiliki harapan hidup yang lebih pendek, seperti di negara berkembang lainnya, karena ketidaksetaraan dalam akses ke layanan perawatan kesehatan yang berkualitas.⁵⁷ Yang kemudian tidak jarang memilih untuk mengakhiri hidup.

4.2.4 Upaya Pemerintah Pakistan Mengenai Kekerasan Berbasis Gender

Pemerintah Pakistan menyadari bahwa memastikan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar dari warga negara Pakistan, termasuk perempuan, sebagaimana diabadikan dalam Konstitusi Pakistan, khususnya Konstitusi Republik Islam Pakistan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dalam ketentuan hukum Pakistan yaitu menjaga dan melindungi hak asasi manusia warga negara Pakistan

⁵⁶Heise, L., Ellsberg M., & Gottemoeller, M. (2002). Tinjauan global tentang kekerasan berbasis gender. *Jurnal Internasional Ginekologi dan Obstetri*, 78(Suppl. 1), S5–S14.

⁵⁷Tinker, A. (2000). Women's health: The unfinished agenda. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 70, 149–158.

keseluruhannya. Hak-hak dasar yang dijaga oleh Undang-Undang Pakistan adalah persamaan hak warga negara, hak untuk tidak ada perampasan dimana hal tersebut hanya boleh di gunakan oleh hukum (perbudakan, kerja paksa), hak untuk diperlakukan sama hadapan hukum (mempertimbangkan hukum, perlakuan yang adil), hak atas perlindungan dari hukuman, hukuman ganda, serta diskriminasi diri, hak untuk bepergian, berkumpul, berbisnis, dan menjadi pekerja, hak dalam berbicara dan menyatakan pendapat, hak atas pendidikan, kepemilikan dan perlindungan harta benda, hak untuk mengamalkan, beribadah dan menjalankan agamanya, perlindungan dari pajak untuk tujuan keagamaan tertentu, keamanan lembaga pendidikan dalam hal keagamaan, hak atas perlindungan dari diskriminasi dalam mengakses layanan publik.⁵⁸

Sayangnya, kekerasan berbasis gender yang ada di Pakistan terus terjadi baik di sektor swasta maupun publik. Pemerintah Pakistan juga menandakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan suatu yang disesali dan menyeramkan di Pakistan selama ini, karena pembenaran tunggalnya atas nilai budaya, adat dan moral. Pemerintah telah mengakui bahwa seluruh kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan suatu kecacatan yang serius terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan yang ada dalam Undang-Undang Pakistan. Sadar akan adanya perwujudan kekerasan berbasis gender, Pemerintah Pakistan melakukan ratifikasi

⁵⁸The Constitution Of The Islamic Republic of Pakistan. Diakses melalui: <http://pakistancode.gov.pk/english/UY2FqaJw1-apaUY2Fqa-apaUY2Fvbpw%3D-sg-jjjjjjjjjjjj> pada 27 Juni 2022.

berbagai perjanjian internasional agar dapat menunjukkan komitmennya menghapus segala bentuk diskriminasi, kekerasan, bias gender, ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan.⁵⁹

Pakistan menekankan dalam “*open government partnership*”, KemenHAM Pakistan telah menciptakan kolaborasi yang kuat dengan *NGO* dan penduduk Pakistan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Pakistan.⁶⁰ Landasan hukum untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di Pakistan pun telah dibentuk, yang didalamnya terdapat kebijakan dan lembaga hukum untuk bentuk kekerasan seperti, menggunakan zat asam, honour killing, dan pemerkosaan. Perubahan hukum juga telah dilakukan untuk mengatasi keluarga yang dirugikan atas kekerasan berbasis gender meminta maaf kepada pelaku kekerasan berbasis gender dalam proses hukum berdasarkan praduga seperti pembunuhan. Usia untuk melakukan pernikahan yang sah telah dinaikkan menjadi 18 tahun, pernikahan paksa sekarang ilegal dan bisa mendapatkan dihukum hingga tujuh tahun penjara, dan pelacuran adalah ilegal.

Pada kasus perdagangan manusia juga mengesahkan 2 konstitusi pada tahun 2018 dengan mandat bagi para penegak hukum pusat agar mengatasi masalah ini dan untuk melakukan kemitraan bersama lembaga penegak hukum di provinsi, serta untuk

⁵⁹ National Policy On Ending Violence Against Women and Girls, 1.
https://pc.gov.pk/uploads/report/NATIONAL_women.pdf, pada 29 Juni 2022.

⁶⁰ UNHCR. *Committee on the Elimination of Discrimination against Women warns against “uneven” application of policies and programmes in Pakistan*. Diakses melalui:
<https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25545&LangID=E> pada 29 Juni 2022.

membentuk lembaga investigasi federal dan kerja sama dengan negara ketiga. Agar korban kekerasan berbasis gender layanan medis atau bantuan hukum, serta dukungan dan konseling. Mahkamah Agung juga mengumumkan pembentukan 116 departemen peradilan yang didedikasikan untuk kekerasan terhadap perempuan.⁶¹

Pakistan juga telah membuat kontak yang dapat dihubungi baik itu hukum ataupun umum, ketika ingin melakukan keluhan/pengaduan atas kekerasan berbasis gender, tidak terbatas dari Pemerintah Pakistan saja namun juga dari LSM. Kontak hukum telah disediakan dengan dukungan darurat, akses rujukan telepon dan pertolongan hukum. Sedangkan untuk kontak umum biasanya disediakan untuk perempuan yang kabur dari hubungan yang kasar, dengan membawa ke tempat perlindungan. Berikut beberapa daftar kontak yang bisa di hubungi untuk melapor kekerasan berbasis gender di Pakistan, perlindungan dan meminta pelayanan:

1. Kementerian Hak dan Asasi Manusia Pakistan : *Shaheed Benazir Bhutto Human Rights Centre for Women*: pelayanan kesehatan, hukum, tempat pengungsian, dan sesi konseling. Shaheed Benazir Bhutto Human Rights Centre for Women, Sector H-8/1, St # 04, Pitras Bukhari Road, Near City School, Ministry of Human Rights, Islamabad.
2. Pemerintah Provinsi Punjab: *The Punjab Women's Toll-Free Helpline*: memberikan layanan dalam menerima keluhan dan pertanyaan, serta melakukan konseling dalam kesehatan mental dan bantuan tentang hukum.

⁶¹ Ibid

3. Asma Jahangir (AGHS) *Legal Aid Cell* (Asma Jahangir): pertolongan hukum resmi.
4. *Digital Rights Foundation: Cyber Harassment Helpline*: menyediakan gagasan hukum resmi, mendukung keamanan digital, konseling dengan psikolog serta sistem acuan bagi korban pelecehan melalui online.
5. Rozan: Dukungan psikologis dan sistem rujukan

Sarana pelaporan dan penuntutan atas perilaku kekerasan berbasis gender masih belum memadai. Aktivis yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mengakhiri kekerasan berbasis gender menemukan, banyaknya kasus kekerasan berbasis gender, korban dan penyintas membatalkan *First Information Report* (FIR) dan menarik diri karena tekanan sosial, politik dan keluarga yang mereka terima. Korban kekerasan berbasis gender lebih memutuskan untuk menarik laporan mereka karena tekanan sosial, politik dan keluarga yang mereka temui.⁶²Situasi ini diperburuk dengan tidak adanya aksi tegas dari aparat hukum terhadap pelaku kekerasan berbasis gender di Pakistan, yang menyebabkan pelaku menikmati pembebasan hukuman bahkan mungkin meminta maaf kepada keluarga korban agar dimaafkan.

⁶² Aurat Foundation." Violence against Women & Girls in the Times of Covid-19 Pandemic". 80. [https://www.af.org.pk/PDF/VAW Reports AND PR/VAWG Report 2020.pdf](https://www.af.org.pk/PDF/VAW_Reports_AND_PR/VAWG_Report_2020.pdf) pada 2 Juli 2022.

4.3 Peran UN Women Dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan

4.3.1 Kerjasama UN Women Dengan Para Pemangku Kepentingan

4.3.1.1 Peran UN Women dalam Upaya Kerjasama Dengan Pemerintahan

Pakistan adalah negara terpadat kelima di dunia dan negara Asia Selatan terbesar kedua. Sensus Penduduk pada tahun 2017 mengungkapkan populasi Pakistan telah meningkat sebesar 57 persen, dari 132,3 juta pada tahun 1998 menjadi 207,7 juta. Di Pakistan telah banyak terjadi kasus mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pemerintah Pakistan telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dasar semua warga negara Pakistan, termasuk bagi perempuan. Dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengatasi segala bentuk kekerasan berbasis gender seperti, CEDAW, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Platform Aksi Beijing, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada komitmen nasional yang ada antara lain Kebijakan Nasional Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Undang-Undang Perlindungan terhadap Pelecehan Perempuan di Tempat Kerja, Hukum Pidana (Amandemen) (Pelanggaran atas nama

atau dalih Kehormatan) Undang-Undang, Hukum Pidana (Amandemen) (Pelanggaran Terkait Pemerkosaan) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Komitmen lokal yang diadopsi termasuk Kerangka Kebijakan Kesetaraan Gender dan Paket dan Inisiatif Pemberdayaan Perempuan. Terlepas dari komitmen ini, peringkat Pakistan untuk kesetaraan gender tetap menjadi salah satu yang terendah di dunia.⁶³

UN Women merupakan salah satu dari badan PBB yang selalu memastikan agar isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi perhatian utama. Hal ini penting karena selama puluhan tahun, PBB telah membuat kemajuan signifikan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women aktif di Pakistan dalam memberikan dukungan teknis kepada pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Satu PBB, kebijakan nasional dan provinsi, serta kerangka kerja untuk menanggapi kebutuhan pembangunan dan komitmen globalnya seputar SDGs dan membantu negara selama kemanusiaan krisis.⁶⁴

UN Women berusaha untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan, memperkuat implementasi kebijakan dan undang-undang yang peka gender dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utama UN Women adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kepemilikan nasional untuk

⁶³UN Women. "About". Diakses melalui:

<https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/about> pada 15 Juli 2022.

⁶⁴ UN Women. "Country Portfolio Evaluation". Diakses melalui:

<https://gate.unwomen.org/EvaluationDocument/Download?evaluationDocumentID=9733> pada 16 Juli 2022.

memungkinkan mitra nasional merumuskan undang-undang dan kebijakan yang responsif gender dan untuk meningkatkan strategi yang berhasil dalam mewujudkan komitmen nasional terhadap kesetaraan gender.⁶⁵

Pada tahun 2012 di Islamabad, Pemerintah Pakistan Bagian Kashmir (PAK) dan UN Women bergandengan tangan di bawah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Sekretaris Departemen Pengembangan Wanita PAK, Mr. Mahmood Ahmad Khan dan Country Director UN Women, Ms. Alice H. Shackelford. MoU tersebut menyusul pemberitahuan terbaru tentang Kerangka Kebijakan Negara untuk Pemberdayaan Perempuan dan pembentukan Departemen Pengembangan Perempuan independen di PAK.

MoU ini bertujuan untuk memaksimalkan bantuan teknis, kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah PAK dan UN Women untuk memastikan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja secara efektif menuju pemberdayaan perempuan di PAK. Dimana Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk meningkatkan kehidupan perempuan dan anak perempuan di PAK. Meski mengakui bahwa perempuan merupakan setengah dari populasi dan terus tertinggal dari laki-laki di hampir semua lapisan masyarakat, ia menyatakan bahwa Pemerintah PAK

⁶⁵ UN Women. "CONSULTANT FOR THE CAPACITY ENHANCEMENT OF STAKEHOLDERS ON GENDER EQUALITY AND WOMEN'S EMPOWERMENT FOR KHYBER-PAKHTUNKHWA (KP) AND PUNJAB". Diakses melalui: http://unwomen.org/pakistan/wp-content/uploads/2018/ToRs_Gender_Training_KP_&_Punjab_for_advertisement.pdf pada 18 Juli 2022.

akan terus mengambil langkah-langkah yang adil untuk memastikan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik komitmen yang dapat dibuktikan.⁶⁶

Pada tahun 2019 pemerintahan Pakistan melalui kantor Ombudsman Balochistan bersama UN Women telah menandatangani perjanjian dalam kerjasama memerangi pelecehan terhadap perempuan di tempat kerja. Dalam MoU, mekanisme pengumpulan data akan ditingkatkan dan diperkuat untuk pengumpulan dan pelaporan data yang lebih baik dan untuk menilai tren melalui kasus yang dilaporkan. Para penandatangan telah sepakat untuk meningkatkan mekanisme provinsi untuk menangani kasus-kasus pelecehan melalui pengembangan materi pelatihan dan pelatihan untuk pelatih. UN Women dan Kantor Ombudsman akan bekerja sama dalam pengembangan kapasitas sel anti-pelecehan dan komite penyelidikan untuk menangani kasus-kasus pelecehan serta peningkatan kesadaran tentang undang-undang pelecehan dan persyaratan kepatuhan.

Hal ini merupakan upaya dalam melindungi perempuan dan anak perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Dalam rencana kerjasama ini memastikan bahwa ada implementasi yang efektif dari undang-undang pelecehan di tempat kerja di seluruh provinsi untuk memungkinkan perempuan mencapai potensi penuh mereka, merasa terlindungi di tempat kerja dan secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi. Pelecehan di tempat kerja menghambat kemajuan wanita saat mereka

⁶⁶ Reliefweb. "UN Women Pakistan signs MoU with Government of Pakistan Administered Kashmir (PAK) on strengthening partnership around women's empowerment". Diakses melalui: <https://reliefweb.int/report/pakistan/un-women-pakistan-signs-mou-government-pakistan-administered-kashmir-pak> pada 18 Juli 2022.

memulai perjalanan pengembangan sosial dan karir. Mereka memiliki hak dasar dan hukum untuk bekerja di lingkungan yang aman, yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi. Kantor Ombudsman memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memastikan implementasi yang efektif dari undang-undang pelecehan.⁶⁷

Pada tahun 2020 UN Women dan Khyber Pakhtunkhwa Judicial Academy (KPJA), menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memajukan kemitraan dalam memajukan agenda kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan (GEWE), dan mendukung platform untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan sektor peradilan peka gender dalam pendekatan mereka ketika berhadapan dengan perempuan penyintas kekerasan dalam kaitannya dengan kebijakan nasional/provinsi dan praktik terbaik internasional.

Pakistan telah bekerja untuk menciptakan kerangka hukum progresif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Implementasi hukum tetap penting untuk perubahan nyata di lapangan. Hanya mekanisme respons yang peka gender, sistematis, dan terkoordinasi dari negara, peradilan, komunitas hukum, dan pemangku kepentingan lainnya yang penting untuk meningkatkan akses perempuan dan komunitas rentan terhadap keadilan. Hal ini merupakan upaya pemerintah provinsi dalam langkah progresif mereka untuk memajukan agenda GEWE. UN

⁶⁷ Habib Ashger. "UN Women, Ombudsperson Balochistan ink accord to fight harassment at workplaces". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/12/un-women-ombudsperson-balochistan-ink-accord-to-fight-harassment-at-workplaces> pada 20 Juli 2022.

Women Pakistan dan Pemerintah Khyber Pakhtunkhwa berkomitmen untuk kemitraan ini bersama-sama, kami lebih kuat baik dalam upaya dan dampak kami.

Area fokus kerja sama ini adalah untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan sektor peradilan seperti hakim, pengacara, jaksa, polisi antara lain; mendukung upaya pengumpulan data dan analisis penelitian di tingkat provinsi; mendukung kelembagaan koordinasi bidang peradilan pidana di tingkat provinsi/kabupaten; bersama-sama membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi dampak kegiatan di bawah MoU ini, menjajaki jalan untuk memperkuat lembaga-lembaga sektor peradilan dengan mempromosikan inisiatif yang tanggap terhadap gender dan mendorong upaya advokasi untuk reformasi hukum dan kebijakan. MoU tersebut menetapkan syarat dan ketentuan kerjasama antara KPJA dan UN Women dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini akan membantu mengarahkan arah upaya bersama menuju peningkatan supremasi hukum melalui penerapan norma-norma internasional dan perundang-undangan nasional.⁶⁸

Dalam pelaksanaan upaya tersebut tahun 2021, UN Women dan Ombudsman setempat membuat inisiatif bersama antara otoritas provinsi untuk membuat ruang publik aman bagi perempuan, anak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Yaitu dengan mengajarkan perempuan dan masyarakat luas tentang hak mereka untuk

⁶⁸ UN Women. "UN Women Pakistan and Khyber Pakhtunkhwa Judicial Academy sign MoU to promote Rule of Law and to make the judicial system accessible and gender-responsive". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/un-women-pakistan-and-khyber-pakhtunkhwa-judicial-academy-sign-mou> pada 23 Juli 2022.

merasa aman di ruang publik, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk melawan pelecehan dan kekerasan, termasuk di transportasi umum. Dalam pengaplikasian upaya tersebut telah disediakan kios informasi di terminal bus, yang berisi selebaran tentang apa yang termasuk pelecehan dan sumber hukum apa yang tersedia bagi perempuan jika hal tersebut di perlukan.

Pada upaya yang telah di lakukan menurut salah seorang penumpang mengenai pojok kios tersebut, telah menginspirasi perempuan untuk mengangkat suara mereka dan melaporkan insiden ketika menghadapi pelecehan di ruang public karena tindakan itu merupakan pelanggaran yang dapat dihukum. Perempuan dan anak perempuan tidak hanya layak untuk merasa aman di jalan dan di transportasi umum: Hal ini juga penting untuk akses yang sama bagi mereka untuk kegiatan sosial, pendidikan, pekerjaan dan kepemimpinan. Namun, pelecehan seksual dan bahkan kekerasan masih terlalu meluas.

Hal tersebut adalah tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan diberdayakan secara sosial, ekonomi, dan politik di ruang publik yang bebas dari pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Sekretariat Ombudsman untuk Perlindungan Perempuan Terhadap Pelecehan di Tempat Kerja bekerja sama dengan perusahaan Trans Peshawar untuk mendirikan *knowledge counter* di layanan *Bus Rapid Transit (BRT)*. Sumber daya berisi informasi tentang undang-undang Anti-pelecehan di tingkat provinsi dan informasi yang relevan tentang pasal 509 KUHP Pakistan untuk meningkatkan kesadaran dan

menyadarkan para komuter dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan bermartabat bagi setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin atau usia.

Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terus menjadi salah satu prioritas utama UN Women di Pakistan. Dimana memastikan bahwa keselamatan publik dan tempat kerja bagi perempuan diprioritaskan dan dipastikan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Kesadaran akan undang-undang dan institusi hak asasi manusia adalah kunci untuk memberikan layanan keadilan dan keselamatan yang lebih baik.

Pendirian sudut pengetahuan di tempat-tempat umum yang berbeda adalah salah satu kegiatan untuk mendukung tujuan ini. Bagi perempuan, langkah ini sangat efektif untuk membatasi pelecehan di ruang publik. Seorang penumpang pria juga berbagi bahwa sudut-sudut ini menyoroti beratnya masalah dan memperjelas bahwa memastikan keselamatan di ruang publik adalah tanggung jawab semua orang. Cara yang dilakukan dengan menghadirkan pesan audio dan visual yang ditampilkan di layar bus terkait Pasal 509 KUHP Pakistan. Manajemen BRT juga telah berkomitmen untuk segera mengaktifkan kembali pesan layanan publik yang diumumkan di bus BRT dan di stasiun.⁶⁹

4.3.1.2 Peran UN Women Dalam Upaya Kerjasama dengan Organisasi Lain

⁶⁹Anam Abbas. "Making public spaces safer for women by improving public awareness: a joint effort in Khyber Pakhtunkhwa by UN Women and the local Ombudsperson". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/making-public-spaces-safer-for-women> pada 25 Juli 2022.

1. UN Women dan *United Nations Office for Project Service* (UNOPS)

UN Women dan UNOPS melakukan kerjasama dengan Departemen Transportasi Khyber Pakhtunkhwa melalui dukungan keuangan dari Pemerintah Jepang. Kerjasama ini di laksanakan pada tahun 2016–2019, mengenai pengembangan Proyek Bus Sakura untuk menyediakan mobilitas yang aman bagi anak perempuan dan perempuan di kota Mardan dan Abbottabad di Pakistan. Sebagai bagian dari proyek, UNOPS mengirimkan 14 bus yang dimaksudkan khusus untuk wanita dan anakanak di bawah usia 12 tahun.

UNOPS selanjutnya membangun 31 halte bus sepanjang rute 10 km di Mardan dan rute 18 km di Abbottabad. Setiap mengembangkan Proyek Bus Sakura untuk menyediakan mobilitas yang aman bagi anak perempuan dan perempuan di kota Mardan dan Abbottabad di Pakistan. Sebagai bagian dari proyek, UNOPS mengirimkan 14 bus yang dimaksudkan khusus untuk wanita dan anakanak di bawah usia 12 tahun. UNOPS selanjutnya membangun 31 halte bus sepanjang rute 10 km di Mardan dan rute 18 km di Abbottabad. Setiap halte bus menawarkan pengaturan tempat duduk, naungan, dan pasokan listrik yang andal dan tidak terputus dari panel surya memastikan bahwa halte bus selalu memiliki penerangan yang baik.

Proyek ini dirancang untuk mandiri, menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi jangka panjang pemeliharaan dan pengoperasian bus. Upaya juga dilakukan untuk melatih dan merekrut pengemudi wanita yang akan bergabung dengan

konduktor untuk menjalankan layanan bus. Sepanjang proyek, UNOPS bekerja sama dengan UN Women, serta berbagai badan pemerintah Khyber Pakhtunkhwa, untuk mengumpulkan informasi tentang masalah keselamatan bagi perempuan, seperti penerangan, jarak pandang, dan keamanan di halte bus. Studi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengevaluasi sistem transportasi yang ada, rute yang tersedia dan halte bus. Desain dan spesifikasi untuk bus dan halte baru dikembangkan oleh UNOPS dan Departemen Transportasi dan Transit Massal pemerintah Khyber Pakhtunkhwa. Kebutuhan gender diidentifikasi dan dipertimbangkan pada setiap tahap proyek.⁷⁰

Sehubungan dengan Kerjasama UN Women dengan UNOPS di dalam nya terdapat penugasan mengenai pemberian nasihat dan layanan teknis tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, kepemimpinan dan partisipasi perempuan, termasuk dalam pengurangan dan manajemen risiko bencana dan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran. Dalam hal ini UN Women Pakistan berusaha menyewa konsultan untuk memberikan dukungan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan berbasis Khyber Pakhtunkhwa dan Punjab (polisi, transportasi dan

⁷⁰ UNOPS. "Infrastructure for gender equality and the empowerment of women". Diakses melalui: <https://content.unops.org/publications/UNOPS-Infrastructure-for-Gender-Equality-and-the-Empowerment-of-women.pdf> pada 25 Juli 2022.

departemen terkait lainnya) tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.⁷¹

Tujuan dari lingkup konsultasi tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas mitranya yang bekerja di KP dan Punjab untuk mempromosikan kesetaraan gender dan agenda pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Pelatihan ini akan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender dan isu-isu pemberdayaan perempuan dan untuk mengatasi kebingungan konseptual, pemahaman yang tidak memadai tentang hubungan antara perspektif gender dan bidang kerja yang berbeda untuk mempromosikan responsivitas gender. UN Women ingin memberikan pelatihan kepada 120 perwakilan (per provinsi yaitu Khyber Pakhtunkhwa dan Punjab).

2. UN WOMEN Dan *Lawyers for Human Rights and Legal Aid (LHRLA)*

Kekerasan Berbasis Gender (GBV) signifikan di Pakistan dan meliputi setiap kelas, etnis, agama, lokasi geografis dan kelompok usia. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan berisiko mengalami kekerasan fisik, emosional dan keuangan baik di dalam rumah tangga mereka maupun di ruang publik, yang menghalangi mereka untuk membuka potensi penuh mereka di bidang sosial,

⁷¹ Ibid

ekonomi dan politik. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP), 5660 kejahatan dilaporkan terhadap perempuan pada tahun 2017 dan angka-angka ini hanyalah puncak gunung es, karena VAWG sangat kurang dilaporkan karena berbagai faktor seperti buta huruf, ketakutan, persepsi aib dan kurangnya sumber daya untuk mencari keadilan.

Pada hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan Pakistan terus diabaikan, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk: kekerasan fisik oleh anggota keluarga atau pasangan intim, pelecehan dan pelecehan seksual oleh orang asing, pembunuhan demi kehormatan, pembakaran, serangan asam, dan mas kawin. Pakistan adalah masyarakat yang didominasi laki-laki di mana kekerasan dipandang sebagai hal yang dapat diterima secara budaya dan sistem kepercayaan para korbannya sendiri mencegah mereka untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan tertentu, seperti kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim. Sehingga, perempuan yang mengalami kekerasan seringkali tidak mencari keadilan dan terus menderita dalam diam. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Pakistan (PDHS) 2012-13, 52 persen wanita yang mengalami kekerasan tidak pernah mencari bantuan.

Pemerintah Pakistan telah menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan pemuda dengan menjadi penandatangan beberapa perjanjian internasional berbasis hak, namun situasi di lapangan membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan. Kerangka hukum tidak cukup untuk menjawab tantangan dalam implementasi undang-undang, mengubah pola pikir yang berlaku

atau menghapus penerimaan sosial atas kejahatan berbasis gender. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan sistem untuk mendukung para penyintas dalam mengakses keadilan serta layanan kesehatan dan sosial. Lembaga pemberi layanan dapat memainkan peran penting dalam menyediakan fasilitas bagi perempuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar. Namun, seringkali layanan yang tersedia tidak berkualitas yang dibutuhkan untuk mendukung perempuan yang mengalami kekerasan secara memadai.

UN Women di Pakistan meningkatkan respons terhadap GBV dengan mendukung akses perempuan terhadap keadilan melalui peningkatan kapasitas mitra, penyediaan layanan berkualitas bagi para penyintas dan penciptaan ruang aman. Untuk menjawab kebutuhan penanganan kekerasan berbasis gender melalui infrastruktur dan layanan, UN Women di Pakistan bekerja sama dengan Pengacara untuk Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum (LHRLA) melalui “Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan melalui Akses terhadap Keadilan, Layanan dan Proyek Ruang Publik Aman” yang didukung oleh Departemen Luar Negeri AS. Proyek ini dibangun di atas upaya Pemerintah dan masyarakat sipil Pakistan untuk menangani VAWG melalui peningkatan pengetahuan dan kapasitas, mempengaruhi perubahan perilaku dan memastikan dukungan yang tepat dan layanan berkualitas bagi para penyintas.

Dalam proyek ini, UN Women Pakistan, Sindh Women Development Department, dan LHRLA bersama-sama meluncurkan Women Protection Unit (WPU) di Karachi pada tahun 2018 untuk menawarkan dukungan kepada korban

perempuan dalam bentuk nasihat ahli, bantuan hukum, konseling, dan bimbingan untuk mengakses keadilan. . WPU terhubung dengan Sel Pengaduan Departemen Pengembangan Wanita Pemerintah Sindh dan penyedia layanan lainnya melalui Madadgaar, saluran bantuan bebas pulsa yang didirikan untuk memberikan konseling melalui telepon kepada perempuan dan anak-anak korban GBV di seluruh Pakistan.

UN Women Pakistan menyadari bahwa tantangan utama dalam menangani GBV adalah penerimaannya sebagai norma oleh masyarakat luas. Inilah sebabnya mengapa UN Women bekerja untuk mengakhiri kekerasan dengan meningkatkan kesadaran tentang penyebab dan konsekuensi GBV dan menerapkan strategi perubahan perilaku untuk mempromosikan kesetaraan gender. UN Women dan LHRLA telah berkolaborasi dalam peningkatan kesadaran tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, sehingga mereka sepenuhnya peka tentang bagaimana mencari bantuan dan layanan ketika menghadapi kekerasan atau eksploitasi. Sejak awal proyek, UN Women dan LHRLA telah menyelenggarakan sesi penyadaran di berbagai komunitas yang menjangkau sekitar 500 peserta untuk menarik perhatian pada layanan WPU dan mengatasi hambatan yang menghalangi perempuan mencari bantuan ketika menghadapi GBV.

Mengambil tindakan melawan kekerasan membutuhkan keberanian tetapi ini adalah langkah pertama untuk menantang pola pikir yang ada dan mengakhiri budaya diam. Di Pakistan, perempuan sering dipaksa untuk tetap diam dan tidak dapat menceritakan penderitaan mereka yang pada akhirnya membuat mereka tidak dapat

mengakses layanan dukungan penting. Perempuan tidak dapat berbicara tanpa takut akan pembalasan karena semua bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual dipandang sebagai topik yang tabu; akibatnya, keadilan ditolak sepenuhnya bagi penderita yang diam. Terlepas dari tantangan saat ini, UN Women Pakistan telah mengambil tindakan berkelanjutan untuk mempromosikan perlunya mengubah norma dan perilaku terkait GBV melalui kampanye kepekaan.

Akibatnya, keberhasilan WPU dalam mendorong perempuan untuk angkat bicara terbukti dengan lebih dari 2.000 perempuan telah berbagi pengalaman dan mencari dukungan dari WPU. Para wanita Pakistan yang pemberani ini diberikan layanan yang mereka butuhkan terkait dengan konseling psiko-sosial, nasihat dan bantuan hukum, dan rujukan. Untuk lebih memfasilitasi perempuan dan remaja, WPU telah memperkenalkan aplikasi mobile untuk pelaporan insiden KTP, sehingga pengguna dapat dengan mudah melaporkan dan melacak keluhan mereka menggunakan ponsel. Konseling virtual juga tersedia untuk memberikan kemudahan layanan online bagi para penyintas.⁷²

4.3.1.3 Peran UN Women Dalam Upaya Kerjasama UN Women dan Sektor Swasta

1. UN Women dan Foodpanda

⁷²Anum Pasha. "Supporting Women Survivors of GBV to Obtain Services and Access Justice". Diakses melalui:

<https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/01/supporting-women-survivors-of-gbv> pada 25 Juli 2022.

Dalam mencapai kesetaraan gender bagi perempuan dan keselamatan di tempat kerja, UN Women Pakistan dan foodpanda Pakistan melakukan kerja sama dan promosi kesetaraan gender di tempat kerja melalui inisiatif yang dilakukan untuk menangani dan menerapkan strategi yang berkaitan dengan responsivitas gender serta lingkungan tanpa diskriminasi dan pelecehan. Perjanjian tersebut baru-baru ini ditandatangani di kantor foodpanda di mana kedua organisasi tersebut berjanji untuk menerapkan inisiatif pengembangan kapasitas untuk memberdayakan perempuan di semua posisi, dengan demikian mengakui hak-hak mereka sebagaimana juga ditentukan oleh Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan PBB (WEPPs). Foodpanda Pakistan menjadi penandatangan prinsip-prinsip ini memiliki kebijakan mengenai promosi hak-hak perempuan dan kesejahteraan di tempat kerja yang menyorotinya sebagai pemberi kerja dengan kesempatan yang sama.

Foodpanda adalah perusahaan e-commerce dan pengiriman makanan online terbesar di Pakistan. Dengan lebih dari 20.000 mitra restoran di seluruh negeri dan jutaan pengiriman makanan setiap bulan. Foodpanda memberikan peluang penghasilan wiraswasta kepada ribuan koki rumahan dan pengendara pengiriman untuk mendapatkan kehidupan yang sukses kapan pun mereka mau. Keberhasilan pada kerjasama ini Foodpanda telah menyebabkan gangguan positif di masyarakat melalui pendekatannya yang bermartabat terhadap profesi pengiriman makanan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif, pelibatan perempuan dalam armada pengendara merupakan upaya yang patut dicontoh untuk

memungkinkan perempuan mematahkan stereotip di satu sisi dan mencari nafkah yang terhormat di sisi lain.⁷³

Sektor swasta telah muncul sebagai promotor pembangunan sosial yang berkelanjutan sambil memberikan dampak positif pada masyarakat dan masyarakat luas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mereka. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 khusus untuk kesetaraan gender membahas kebutuhan untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memberdayakan mereka yang pada akhirnya akan memiliki efek berganda untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan Global dan WEP bertujuan untuk menyatukan sektor publik dan swasta, dan masyarakat sipil untuk mempercepat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja, pasar, dan masyarakat.

4.3.1.4 Peran UN Women dalam Upaya Melakukan Kampanye, Program dan Konvensi Internasional Mengenai Kekerasan Berbasis Gender

1. Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV)

16 Hari Aktivisme Menentang Kekerasan Berbasis Gender adalah kampanye internasional tahunan yang dimulai pada 25 November, Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dan berlangsung hingga 10 Desember,

⁷³ UN Women. "UN Women Pakistan and foodpanda Pakistan collaborate for the promotion of workplace safety and gender equality for women". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2022/06/un-women-pakistan-and-foodpanda-pakistan-collaborate-for-the-promotion-of-workplace-safety> pada 27 Juli 2022.

Hari Hak Asasi Manusia. Ini dimulai oleh para aktivis di Institut Kepemimpinan Global Wanita yang diresmikan pada tahun 1991 dan terus dikoordinasikan setiap tahun oleh Pusat Kepemimpinan Global Wanita. Ini digunakan sebagai strategi pengorganisasian oleh individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.⁷⁴

Dalam menunjukkan solidaritas dengan kampanye 16 Hari Aktivisme global melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) ditahun 2020, secara resmi Pakistan ikut bergabung dengan merubah Gedung Majelis Nasional Pakistan dan Gedung Presiden menjadi oranye. Anggota parlemen perempuan dari beberapa partai politik serta perwakilan dari pemerintah, badan-badan PBB dan masyarakat sipil juga berpartisipasi dalam acara tersebut dan berjanji untuk melakukan upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Pakistan. Mereka berjanji untuk berperan aktif dalam membebaskan negara dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender dan berdiri bersama dan mendukung para penyintas.

Acara ini diselenggarakan bersama oleh Kaukus Parlemen Wanita Federal (WPC) dan UN Women Pakistan untuk memulai 16 Hari Aktivisme melawan GBV, kampanye global yang berlangsung setiap tahun mulai tanggal 25 November, Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga 10

⁷⁴UN Women. "16 Days of Activism against Gender-Based Violence". Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism> pada 27 juli 2022.

Desember, Hari Hak Asasi Manusia Internasional, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas di seluruh dunia. Kampanye 16 Hari digunakan sebagai strategi pengorganisasian oleh individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, tema 16 Hari Aktivisme Melawan GBV tahun ini adalah “Dana, Tanggapi, Cegah, Kumpulkan!” Tema tersebut menyerukan untuk memprioritaskan dukungan dan pendanaan untuk layanan penting untuk pencegahan dan penanggulangan GBV terutama dalam situasi COVID-19, mendukung organisasi hak-hak perempuan yang bekerja di nexus COVID-19 dan GBV, mendeklarasikan kebijakan nasional nol toleransi terhadap GBV dengan rencana aksi konkret, meluncurkan kampanye mobilisasi sosial perubahan perilaku, melakukan langkah-langkah eksplisit untuk mempertahankan layanan bagi penyintas GBV sebagai hal yang penting selama penguncian COVID-19, memastikan kontinum mekanisme respons peradilan pidana yang memadai, dan mengumpulkan data dengan tujuan untuk menginformasikan dan meningkatkan GBV layanan dan intervensi.

Pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan sebagai prioritas utama. Saatnya untuk mengakui peran perempuan dan mengambil langkah-langkah substansial untuk memastikan partisipasi setara perempuan dalam legislasi. Kesetaraan gender tidak dapat dicapai tanpa mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Perempuan perlu didorong dan dimotivasi dan

pemerintah saat ini berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka. Untuk memberikan wanita status hak mereka, kita juga perlu mengubah pola pikir dan perilaku, upaya bersama diperlukan untuk membawa mereka ke arus utama.

Dengan kebangkitan Covid-19, dunia mundur di dalam rumah karena penguncian, membuat situasi semakin buruk bagi wanita. Eskalasi dalam pandemi kekerasan terhadap perempuan yang sudah ada cukup terlihat. Konstitusi Pakistan meniadakan diskriminasi apapun atas dasar gender. Pasal 25(3) dan 34-nya adalah dua pasal paling signifikan yang berpihak pada perempuan. Pasal 25(3) menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi Negara untuk membuat ketentuan khusus apapun untuk perlindungan perempuan. Fakta bahwa memiliki perempuan dalam peran pengambilan keputusan merupakan kunci kepentingan nasional, portofolio terkemuka hak asasi manusia, keselamatan sosial, kesehatan, dan perubahan iklim, menjamin perlindungan dan keterwakilan perempuan di semua tingkatan. Dengan lebih banyak perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, dapat membuat langkah besar dalam memajukan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender serta menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.⁷⁵

Kampanye 16 Hari Aktivisme tahun ini fokus pada kemunculannya sebagai pandemi bayangan kekerasan terhadap perempuan di tengah Covid-19. Tema global

⁷⁵UN Women. "National Assembly, Presidency turn orange to launch 16 Days of Activism against Gender-Based Violence in Pakistan". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/11/national-assembly-presidency-turn-orange> pada 1 Agustus 2022.

“Dana, Tanggapi, Cegah, Kumpulkan!” menyerukan tindakan global untuk menjembatani kesenjangan pendanaan, memastikan layanan penting bagi para penyintas kekerasan selama krisis COVID-19, fokus pada pencegahan, dan pengumpulan data yang dapat meningkatkan layanan penyelamatan jiwa bagi perempuan dan anak perempuan.

2. Kampanye #StopJahezkhor

Dalam upaya untuk membasmi kejahatan sosial mahar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Wanita Pakistan meluncurkan kampanye untuk mengatasi mereka yang menikmati praktik menerima mahar. “Hentikan Jahezkhor”, artinya hentikan praktik mahar. Ungkapan itu juga merupakan tagar resmi kampanye PBB Pakistan. Stensil henna dirancang untuk melibatkan penonton, influencer, selebritas, aktivis masyarakat sipil, dan pejabat pemerintah, yang dibuat untuk menunjukkan solidaritas untuk mengakhiri praktik mahar dan kekerasan yang terkait dengannya.⁷⁶

Praktik kuno menuntut mahar adalah kutukan bagi perempuan Pakistan dan keluarga mereka, dan UN Women melawannya dengan alat modern: media sosial. Mahar terdiri dari hadiah, perhiasan, uang tunai atau aset yang diharapkan diberikan oleh keluarga pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria pada saat pernikahan. Ketika harapan tidak terpenuhi, pengantin wanita dan keluarganya sering menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan meskipun ada beberapa undang-undang (yang tidak

⁷⁶ UN Women. “UN Women Pakistan”. Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan> pada 4 agustus 2022.

ditegakkan dengan baik) terhadap praktik tersebut. Sebuah berita Maret 2016 di The News International Pakistan mengatakan Pakistan memiliki tingkat kematian terkait mas kawin per kapita tertinggi di Asia Selatan, sekitar 2.000 orang Pakistan mengalami nasib ini setiap tahun.

Kampanye media sosial UN Women Pakistan dimulai pada Desember 2018, bertepatan dengan musim pernikahan musim dingin Pakistan. UN Women menciptakan istilah dalam bahasa Urdu, “Jahezkhorī” dan menggunakan tagar #StopJahezkhorī (*Stop Dowry Mongering*) di situs web dan aplikasi media sosial. Tujuannya: memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat tentang praktik dan malu pencari mahar. Menurut Aisha Mukhtar dalam perwakilan PBB UN Women, “Dalam masyarakat di mana anak perempuan umumnya dianggap sebagai beban dan bukan aset, kami juga ingin menyampaikan pesan yang kuat melalui kampanye kami untuk menolak hak laki-laki dalam mencari “kompensasi financial” untuk mengambil alih beban dari keluarga pengantin wanita”.

Kampanye #StopJahezKhorī dimulai dengan bantuan dari laki-laki paling memenuhi syarat di negara itu, yaitu aktor Ali Rehman. Pada 19 Desember 2018, Rehman mengumumkan di feed Instagram-nya bahwa dia akan menikah dan akan mengungkapkan pengantinnya kepada dunia di acara pagi GEO TV keesokan harinya. Namun dalam siaran langsung yang ditonton jutaan orang tersebut, Rahman malah membuka tandu pengantin untuk mengungkapkan hadiah mahar berupa mesin jahit, kunci mobil, peralatan dapur, dan perhiasan emas. Aksi tersebut menyoroti

bagaimana praktik mahar mengukur nilai pengantin wanita dalam hal barang materi. Dan itu mendorong dialog tentang bagaimana harapan mahar dapat menambah tekanan ekonomi, tekanan psikologis dan ancaman bagi keluarga pengantin wanita.

Tayangan tersebut juga menayangkan rekaman pesan khusus dari Ketua Dewan Ideologi Islam, Dr. Qibla Ayaz. “Islam dengan tegas melarang praktik menuntut atau mengharapkan mahar dari keluarga pengantin wanita,” dan “Islam dengan tegas melarang pamer kekayaan, pengeluaran berlebihan untuk pernikahan dan upacara lainnya dan membebani keluarga mempelai wanita dengan tuntutan materi.” UN Women mengoordinasikan serangkaian posting #StopJahezKhoris oleh influencer, blogger, selebriti, dan aktivis dan pakar hak-hak perempuan terkemuka di Twitter, Instagram, dan Facebook. Mereka mempertanyakan narasi dominan tentang praktik mahar, mengimbau pemikiran kritis, dan menunjukkan konsekuensi berbahaya.

Dalam pernikahan di Asia Selatan, kebahagiaan pengantin wanita di rumah barunya sering dilambungkan dengan pola pewarna henna yang rumit di telapak tangannya. Selebriti, influencer, dan aktivis bergabung dengan kampanye UN Women Pakistan dengan mencap telapak tangan mereka dengan simbol henna “StopJahezKhoris” dan memposting foto ini di akun media sosial mereka. Dengan demikian, sarkasme digunakan untuk memicu diskusi masyarakat tentang praktik terkait mahar. Kampanye ini berlangsung selama musim pernikahan. Banyak peserta pernikahan memposting gambar telapak tangan pacar #StopJahezKhoris mereka di media sosial.

Kampanye ini memperoleh hampir 495 juta tayangan dan memicu debat media sosial. Beberapa poster mengejek kampanye tersebut. Mereka menjawab bahwa terkadang keluarga mempelai wanita juga menuntut harta benda dari mempelai pria atau keluarganya. Dan bahwa keluarga biasanya ingin menikahkan anak perempuan mereka hanya dengan pengantin pria yang kaya. Pengguna media sosial lainnya berbagi cerita pribadi untuk mendukung kampanye #StopJahezKhorl dan mengakui bahwa mereka sendiri telah menyerah pada tekanan mas kawin. Keberhasilan kampanye ini diakui secara luas. Sebuah berita BBC mengatakan, “Kampanye ini berperan penting dalam memicu percakapan seputar masalah”.

3. Program *Essential Service Package* (ESP)

UN Women hari ini meluncurkan Paket Layanan Esensial (ESP) untuk memastikan bahwa layanan sosial yang berkualitas diberikan kepada perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan di Pakistan. Essential Services Package (ESP) adalah program bersama global Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang layanan penting bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan akses yang lebih besar ke serangkaian layanan multi-sektor yang penting dan berkualitas yang terkoordinasi untuk semua perempuan dan anak perempuan yang pernah mengalami kekerasan berbasis gender. ESP dilaksanakan melalui kerjasama antara UN Women, UNFPA, WHO, UNDP dan UNODC. UN Women, sebagai badan utama global untuk layanan sosial bagi korban dan penyintas kekerasan meluncurkan program ini di Pakistan

dengan fokus utama pada layanan sosial. Program ini mengidentifikasi layanan penting yang akan diberikan oleh para pemangku kepentingan sektor kesehatan, layanan sosial, polisi dan peradilan serta memberikan seperangkat pedoman untuk meningkatkan koordinasi layanan penting di Pakistan.

Dalam pidato nya pada saat diskusi panel berlangsung, Bapak Brek Batley berkomentar bahwa, “Perempuan dan anak perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Tetapi sampai hak itu terwujud, mereka membutuhkan dukungan. Dalam program ini Australia menjadi salah satu donor pendiri Paket Layanan Esensial PBB Bersama di Pakistan. Komitmen sebesar AUD 4,5 juta ini, di 10 negara percontohan, akan membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada para penyintas kekerasan.” Muhammad Hassan Mangi menyatakan bahwa, “Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah bidang prioritas utama Pemerintah Pakistan.

Kementerian Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk memasukkan rekomendasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan itulah alasan kami memiliki komite CEDAW di semua provinsi. Mekanisme koordinasi yang efektif sangat penting untuk sistem rujukan yang kuat untuk membantu korban kekerasan. Pemerintah mengambil langkah-langkah peningkatan kapasitas untuk membuat sistem ini lebih kuat dan efektif.” Ia juga menekankan pentingnya legislasi dan implementasi hukum yang efektif untuk mengakhiri kekerasan dan membuat layanan sosial dapat diakses oleh para korban.

Dimulai nya program ini dengan melakukan konsultasi gabungan dengan perwakilan dari semua sektor untuk implementasi yang efektif dari pedoman dan protokol global di Pakistan. Dalam hal ini dilihat adanya komitmen kuat dari mitra pemerintah dan upaya berdedikasi untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan melalui undang-undang, pemberian layanan, peningkatan kesadaran dan advokasi. Dan juga infrastruktur untuk menanggapi kasus kekerasan melalui rumah penampungan/DuA. Peluncuran Program Unggulan ESP membawa Pakistan selangkah lebih dekat dalam memenuhi komitmen Nasional dan Internasional untuk mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan dan mempercepat kemajuan menuju pencapaian target yang ditetapkan dalam SDGs dan lainnya komitmen internasional.⁷⁷

4. UN Women dan Konvensi Internasional CSR4Women

Pada tahun 2021 UN Women menjadi tuan rumah konvensi CSR4Women “*The Untapped Potential*” di Islamabad pada 21 September 2021. Acara ini didukung oleh Pemerintah Norwegia dan diketuai oleh Sima Kamil, Deputy Gubernur Bank Negara Pakistan. Konvensi tersebut mempertemukan para pemimpin bisnis, CEO perusahaan swasta, kepala Kamar Dagang, mitra pembangunan, dan pakar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk membahas potensi peran CSR dalam mendorong peluang ekonomi inklusif bagi perempuan.

⁷⁷ UN Women. “*UN Women Pakistan launches Essential Services Package for social services for women and girls subject to violence in Pakistan*”. Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/07/un-women-pakistan-launches-essential-services-package-for-social-services> pada 8 agustus 2022.

Hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan menghadirkan empat kemenangan untuk sektor swasta, negara bagian, perempuan dan UN Women Pakistan. Melalui upaya kolaborasi ini, akan mencapai visi menjadikan Pakistan ekonomi terbesar ke-10 pada 2047. Konvensi tersebut memberikan kesempatan untuk mengenali peran perempuan Pekerja Berbasis Rumahan (PBR), sambil mengidentifikasi kemungkinan untuk kemajuan ekonomi mereka di ruang CSR. Bukti menunjukkan bahwa PBR berkontribusi 1,5 persen dari PDB Pakistan, data yang tersedia tidak termasuk mereka yang wiraswasta atau pekerja keluarga yang berkontribusi. Menurut Survei Angkatan Kerja untuk 2017-2018, dari 5,26 juta PBR di Pakistan, 81 persen adalah perempuan. PBR memainkan peran yang semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Namun, kontribusi mereka diremehkan dengan pengakuan dan perlindungan hukum yang terbatas.

UN Women Pakistan telah bekerja dengan perusahaan sektor swasta di Pakistan sejak 2015 melalui penerapan *Women's Economic Empowerment Principles* (WEPEs). WEP adalah seperangkat prinsip responsif gender yang menawarkan panduan kepada bisnis tentang cara mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di tempat kerja dan pasar. UN Women telah memobilisasi komunitas penandatangan WEP yang berkembang pesat di Pakistan, yang melakukan pekerjaan yang berharga dan berdampak dalam hal ini.

Diskusi panel ahli menampilkan praktik dan pengalaman terbaik dari inisiatif CSR untuk mengidentifikasi peluang penyaluran dana CSR menuju masa depan yang

terjamin secara ekonomi bagi perempuan di Pakistan. Konvensi diakhiri dengan beberapa komitmen yang sangat relevan dan poin tindakan yang disepakati dari para peserta untuk memelihara generasi baru pemimpin bisnis dan publik yang akan membawa CSR dan keberlanjutan ke tingkat berikutnya.⁷⁸

UN Women sebagai Organisasi Internasional berperan dalam melakukan upaya untuk mengatasi ancaman kemanusiaan atas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan. Sesuai dengan definisi Archer bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran utama yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Tetapi dalam penelitian ini UN Women hanya memainkan dua peran saja yakni sebagai instrumen dan juga sebagai arena. Peran sebagai instrumen berarti Pakistan menggunakan UN Women sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai instrumen, Pakistan bekerja sama dengan UN Women untuk menyusun strategi guna mengatasi kekerasan berbasis gender dalam pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender. UN Women bersama Pemerintah Pakistan dalam kerjasamanya telah mengikuti ketentuan CEDAW serta mengeluarkan undang-undang untuk perempuan, dan melakukan penandatanganan-penandatanganan MoU mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women membantu pemerintahan di Pakistan dalam pembentukan pengembangan perempuan independent di PAK,

⁷⁸ UN Women. "UN Women puts spotlight on the role of CSR for Women's Economic Empowerment in Pakistan". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/09/un-women-puts-spotlight-on-the-role-of-csr> pada 9 agustus 2022.

menyediakan kios informasi di terminal bus terkait bentuk kekerasan dan sumber hukum serta menampilkan pesan audio dan visual terkait pasal 509 KUHP Pakistan. Kemudian, UN Women memiliki program kampanye 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender (GBV), kampanye #StopJahezkhori dan *essential service package* (ESP) untuk mengatasi keamanan perempuan dan anak perempuan yang kerap dijadikan korban kekerasan.

Peran UN Women selanjutnya adalah sebagai arena, UN Women memenuhi peran tersebut dengan memfasilitasi pertemuan yang membahas tentang peran CSR dalam mendorong peluang ekonomi inklusif bagi perempuan. Dimana konvensi tersebut memberikan kesempatan untuk mengenali peran perempuan Pekerja Berbasis Rumahan (PBR), sambil mengidentifikasi kemungkinan untuk kemajuan ekonomi mereka di ruang CSR. Bukti menunjukkan bahwa PBR berkontribusi 1,5 persen dari PDB Pakistan, data yang tersedia tidak termasuk mereka yang wiraswasta atau pekerja keluarga yang berkontribusi. Menurut Survei Angkatan Kerja untuk 2017-2018, dari 5,26 juta PBR di Pakistan, 81 persen adalah perempuan. UN Women memenuhi perannya sebagai arena juga dengan melakukan kerjasama dengan IGO, NGO, dan sektor swasta. Seperti kerjasaman UN Women dengan UNOPS, LHRLA dan Foodpanda.